

Besiru!

Revitalisasi Banjar di Lombok

Farid Tolomundu
Moch. Yamin

Editor:
Muhary Wahyu Nurba

2007

Daftar Isi

- **Prolog**
“Kepingan Surga” yang Tersia
 - Mimpi Tak Terbeli
 - Potensi Tersia

- **Bagian Pertama**
Revitalisasi Banjar: Memulai dari yang Dimiliki
 - Memperkuat Modal Sosial
 - Sebagai Strategi Kultural

- **Bagian Kedua**
Revitalisasi *Banjar*: Sebuah Pengalaman
 - Menyebarkan “Virus”
 - Pembentukan Nilai
 - Bale *Banjar*: Ruang Budaya

- **Bagian ketiga**
Revitalisasi Banjar: Perluasan Cakupan
 - Pendidikan Untuk Semua
 - Penguatan Ekonomi
 - Penumbuhan Etos

- **Bagian Keempat**
Revitalisasi *Banjar*: Sebuah Tantangan
 - Intervensi Negara
 - Penguatan Kelembagaan

- **Epilog**
Revitalisasi *Banjar*: Model Otonomi Pembangunan Desa
 - Intervensi Negara

Pengantar

Adalah sebuah kehormatan bagi BaKTI/SoFEI untuk dapat mendukung penerbitan buku ini berkat sokongan *Decentralization Support Facility* (DSF) dan terutama Pemerintah Britannia Raya melalui *Department for International Development* (DfID). Banyak hal yang dapat dipetik sebagai pelajaran dan bahan renungan dari buku “Besiru! Revitalisasi Banjar di Lombok”. Pada tingkat lokal, buku ini menyadarkan kembali mengenai potensi dan kapasitas masyarakat yang sudah lama terpinggirkan melalui pemupukkan modal sosial dan keyakinan diri yang diperoleh dari pengakuan terhadap kearifan dan lembaga lokal. Pada tingkat nasional, renungan terhadap apa yang terkandung dalam buku ini, meskipun berorientasi mikro kedaerahan, memberikan inspirasi terhadap apa yang dapat dicapai secara lebih luas/makro pada tingkat nasional melalui optimalisasi kekayaan yang timbul dari kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan pada tingkat internasional, buku ini mengingatkan berbagai penentu kebijakan bahwa pembangunan yang membebaskan sebagaimana diusung oleh Amartya Sen, adalah pembangunan yang difokuskan pada manusia yang menjalani dan seharusnya “menikmati” proses dan kegiatan pembangunan tersebut.

Meskipun kearifan lokal sering dibicarakan, namun hal ini lebih dikaitkan dengan berbagai pengalaman masyarakat dalam interaksinya dengan alam. Proses interaksi dengan alam ini menghasilkan pengetahuan misalnya terhadap khasiat tumbuh-tumbuhan yang dapat diteliti dan, bila dimungkinkan, dikomersilkan. Buku ini mengangkat kearifan lokal terkait dengan interaksi antar manusia. Kearifan yang timbul dan bertumbuh dari konteks lokal ini, merupakan pengetahuan yang tidak kalah pentingnya karena merupakan aset atau modal sosial yang kini diakui perannya setara atau bahkan lebih daripada modal keuangan dan aset fisik. Pengakuan terhadap aset-aset lokal ini penting untuk menambah keyakinan diri bahwa apa yang diketahui dan dikembangkan secara tradisional tetap memiliki relevansi terutama dalam proses pembangunan yang tidak sepenuhnya bergantung pada daya dan kinerja pemerintah.

Pelajaran yang dapat dipetik dari konteks lokal seperti yang digambarkan pada buku ini, meskipun dilakukan dengan motif yang beraras lokal atau mikro, memiliki signifikansi nasional atau makro. *Besiru – Revitalisasi Banjar di Lombok*, menggambarkan salah satu diantara berbagai upaya untuk menggali kembali potensi, kapasitas dan kearifan lokal bagi pembangunan. Apabila upaya seperti ini terus didorong secara nasional, maka potensi masyarakat untuk berkembang tanpa harus menunggu dan bergantung sepenuhnya pada pemerintah, dapat menghasilkan berbagai efisiensi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Secara kolektif, kapasitas yang bermuara pada kebhinekaan di Indonesia dapat menghasilkan paradigma pembangunan yang jauh berbeda dimana keragaman justru dilihat sebagai kekuatan bangsa. Hal ini sekaligus mengubah pola-pola pembangunan nasional yang lebih mencirikan penyeragaman sebagai upaya untuk mencapai efisiensi, tanpa penghargaan terhadap nilai efektivitas yang timbul dari lembaga-lembaga lokal yang selama ini "tersia"-kan di berbagai daerah.

Meskipun Amartya Sen memperoleh penghargaan Nobel bagi tulisannya "*Development as Freedom*" (1999), pendekatan pembangunan acapkali masih berorientasi pada instrumen pembangunan yang lebih mudah diukur pencapaiannya, dibanding hasil dari instrumen-instrumen yang dikembangkan dalam peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. "*Besiru! Revitalisasi Banjar di Lombok*" merupakan satu contoh di antara berbagai upaya di Indonesia yang difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui revitalisasi banjar sebagai lembaga tradisional dengan penguatan modal sosial yang mendorong kebersamaan, seperti yang dimaknai dalam konsep "*besiru*".

Semoga karya ini tidak saja menjadi sumber inspirasi mengenai apa yang dapat dicapai apabila terdapat segelintir manusia inspiratif seperti Bp. Mochammad Yamin yang memiliki keyakinan ("*self-trust*") terhadap potensi lembaga tradisional. Diharapkan pula

bahwa tulisan ini juga dapat mendorong berbagai tulisan yang mengangkat pengalaman lokal yang dapat mengisi wacana pembangunan nasional dan internasional agar lebih berbasis *trust*, sebagai unsur kunci dalam membangun modal sosial.

Makassar, 2008.

Petrarca Karetji

Prolog

“Kepingan Surga” yang Tersia

Pulau Lombok merupakan satu dari dua pulau utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau utama lainnya adalah Pulau Sumbawa.¹ Penampakan fisik Pulau Lombok ibarat sepatu boot yang tertutup celana kedodoran. Jika merujuk kepada definisi *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS), pulau “sepatu boot” ini tergolong pulau kecil karena luas keseluruhannya kurang dari 10 ribu kilometer persegi.

Sekalipun kecil, Pulau Lombok dihuni populasi sekitar 2,8 juta jiwa. Artinya tiap satu kilometer persegi lahan, ditempati rata-rata 599 jiwa. Dengan tingkat kepadatan seperti itu, tidak heran jika Lombok disebut sebagai satu dari sedikit pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Kontras dengan gambaran kepadatan di Pulau Sumbawa. Di pulau yang satu ini, kepadatan penduduknya berkisar 76 jiwa perkilometer persegi. Dengan luas 15,4 ribu kilometer persegi, Pulau Sumbawa hanya dihuni tidak lebih dari 1,2 juta jiwa populasi manusia.

Dari 2,8 juta populasi yang menghuni Pulau Lombok, lebih dari 70% bermukim di pedesaan. Mayoritas mereka menjadi petani yang sebagian besar menggarap lahan di bagian tengah pulau yang berlembah, subur dan gembur. Rata-rata petani Lombok tidak memiliki lahan sendiri. Mereka adalah petani penggarap atau buruh tani. Pembangunan pemukiman yang cepat akibat ledakan populasi penduduk, membuat ladang garapan pertanian kian menyusut. Hal ini berdampak signifikan menjadikan kehidupan petani di Lombok semakin sulit.

¹ Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2005, luas pulau Lombok, termasuk 332 pulau-pulau kecil yang mengitarinya (gili), ditaksir 4,8 ribu kilometer persegi. Pulau ini berbentuk segi empat dengan panjang 113 kilometer persegi dan lebar sekitar 81 kilometer.

Dengan segala keterbatasan itu, jutaan petani di Lombok berjasa besar menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah penghasil beras utama di luar Jawa. Pada 2005 misalnya, produksi beras petani Lombok menyumbang lebih dari 60 % dari total produksi beras NTB yang mencapai 926 ribu ton. Padahal angka konsumsi beras pada tahun yang sama untuk seluruh NTB hanya 530 ribu ton. Ironisnya, keberlimpahan beras di tingkat makro daerah, tidak tergambarkan pada level rumah tangga petani. Mayoritas petani Lombok hidup dalam lingkaran kemiskinan. Nasib mereka seperti anak ayam yang mati di lumbung padi².

Kemiskinan petani di Lombok jelas karena akses mereka yang terbatas terhadap sumberdaya. Sebagai buruh tani dengan lahan garapan yang terus menyusut, sudah pasti hidup petani Lombok jauh dari sejahtera. Kondisi ini semakin runyam dengan tidak terpenuhinya secara layak kebutuhan mendasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Mimpi Tak Terbeli

Data statistik memperlihatkan dengan terang bagaimana masyarakat pedesaan di Lombok kesulitan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Disinyalir dari 4.000 anak putus sekolah di NTB setiap tahunnya, lebih dari 50 % terjadi di Pulau Lombok. Angka rata-rata lama sekolah terendah untuk tingkat provinsi NTB, juga ada di Lombok. Terutama di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Di kedua kabupaten ini, rata-rata lama sekolah kurang dari 6 tahun. Artinya, secara umum anak-anak di sana tamat SD pun tidak³.

Angka buta huruf pun masih terhitung tinggi. Pada 2005, dilaporkan fakta, di Kabupaten Lombok Tengah sekurangnya 69,5 % penduduk yang berusia 10-44 tahun, masih belum merdeka dari buta aksara. Kabupaten lainnya di Pulau Lombok tidak jauh berbeda angkanya, sehingga tidak heran dari 222 ribu penduduk NTB yang buta aksara di tahun 2005, lebih dari 60 %nya ada di Pulau Lombok⁴.

² Periksa *Tinjauan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Bapedda dan BPS NTB 2004).

³ Laporan tahunan Dinas pendidikan dan Olah Raga Provinsi NTB (2005).

⁴ *Ibid*

Lain halnya dengan potret kesehatan di sana. Pada bulan Mei 2005, di halaman depan sebuah harian terkemuka terbitan Jakarta, terpampang jelas foto seperempat halaman seorang balita kurus kering, mata cekung, dan perut buncit dengan kulit kaki keriput. Di bawah foto itu tertulis kalimat panjang: “Muzilawati (1,5 tahun), putri pertama suami-istri Muziani dan Mulianah, warga dusun Bengkel Utara, desa Bengkel, Labuapi Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, penderita busung lapar. Ketika ditemui berat badan bocah itu berangsur membaik dari 4,5 kilogram menjadi 5,7 kilogram selama sebulan, setelah ditangani pihak Puskesmas Labuapi”⁵.

Penggalan berita di atas, secara terang benderang menunjukkan betapa potret kesehatan masyarakat Lombok begitu mengenaskan. Pulau Lombok hampir-hampir identik sebagai kantong masalah kesehatan. Kasus balita gizi buruk misalnya, secara rutin terjadi setiap tahunnya. Dari periode Januari hingga Mei 2004 saja, tercatat 822 anak balita terserang gizi buruk. Total sepanjang tahun itu terdata 1.500 lebih kasus balita gizi buruk.

Pada 2005, faktanya juga sama mengenaskan. Di tahun itu teridentifikasi tidak kurang 1.400 kasus busung lapar dengan jumlah korban meninggal 22 orang. Data yang terlacak hanyalah pucuk dari gunung es. Potensi gizi buruk di bawah permukaan, pastilah jauh lebih besar dan mengerikan. Buktinya, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mensinyalir 10 % atau sekitar 49 ribu balita NTB, hidup dengan asupan gizi yang jauh di bawah standar kesehatan. Lebih dari 60 % nya berada di Pulau Lombok⁶.

Selain gizi buruk, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Di NTB dipastikan merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Sekali lagi mayoritas kasus AKI dan AKB di NTB ada di Pulau Lombok. Pada 1996 misalnya, tercatat AKB di NTB mencapai 75 kasus per 1.000 kelahiran. Ini hampir dua kali rata-rata angka nasional. Pada 1999, AKB di NTB turun menjadi 68 kasus lalu turun lagi menjadi 61 kasus pada 2001. Tetapi “kemajuan” ini belum cukup menjadikan NTB keluar dari pusaran

⁵ *KOMPAS*, 26 Mei 2005

⁶ Hananto Wiryo, “Menyoal Busung Lapar di Nusa Tenggara Barat” dalam *Jurnal Ikatan Dokter Anak*, Juli 2006. Baca pula ulasan panjang “Bumi Gora dan Ironinya”, *KOMPAS*, 4 Juni 2005.

persoalan. Bahkan menurut data resmi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM, AKB di NTB merupakan salah satu yang terbesar di muka bumi⁷.

Begitu pula dengan AKI, sejauh ini NTB masih menjadi penyumbang terbesar dari tingginya AKI di Indonesia. Padahal di tingkat Asia, Indonesia masih merupakan negara dengan kematian ibu tertinggi. Ini artinya, secara tidak langsung NTB adalah salah satu daerah dengan kematian ibu tertinggi di kawasan Asia⁸.

Fakta paling nyata yang menunjukkan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di Lombok bisa terlacak dari rendahnya angka harapan hidup. Berdasarkan komponen IPM 2005, angka harapan hidup terendah di Indonesia ada di Kabupaten Lombok Timur. Di kabupaten dengan populasi penduduk terbesar di Pulau Lombok ini, angka harapan hidup rakyatnya 58,3 tahun. Bandingkan dengan Kabupaten Tabanan di Bali yang mencapai 74,2 tahun.

Ironisnya, sekitar pertengahan 1980-an, Emil Salim pernah secara terbuka menyatakan jika ingin cepat dijemput malaikat maut tinggal saja di Lombok. Kini setelah lebih 20 tahun berlalu, suka atau tidak lontaran Emil Salim itu tetap menjadi potret kekinian masyarakat Lombok yang tak terbantahkan. Artinya selama 20 tahun lebih, pembangunan manusia di pulau yang sering dijuluki pulau seribu mesjid ini, tidak menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan. Alhasil, bagi masyarakat pedesaan di Lombok, kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan masih menjadi barang mahal yang sulit terjangkau, bahkan dalam mimpi sekalipun.

Potensi Tersia

Potret buram pembangunan manusia di Lombok sungguh ironis, mengingat Lombok tidak kekurangan potensi sumberdaya. Lombok bukan hamparan gurun pasir atau pulau berbatu seperti sebagian daratan Afrika. Jika Bali dijuluki *Island of Paradise*,

⁷ Lihat *Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat*, BPS 2004.

⁸ Saat ini, Angka Kematian Ibu di Indonesia diperkirakan 307 per 100.000 kelahiran. Kira-kira sekitar satu kematian dalam setiap 65 kelahiran. Bandingkan dengan Thailand yang satu kematian dalam setiap 1.100 kelahiran. Jangan pula bandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Indonesia pasti akan semakin terlihat terbelakang. Baca *KOMPAS*, 21 April 2007

Lombok disebut sebagai *Heaven on The Planet*. Harfiahnya berarti kepingan surga yang terlontar jatuh ke bumi⁹. Ungkapan ini mungkin berlebihan, tetapi sekurangnya menunjukkan Lombok menyimpan potensi sumberdaya besar, baik berupa sumberdaya alam ataupun modal sosial.

Potensi kelautan misalnya, dengan luas laut mencapai 29 ribu kilometer persegi dan garis pantai membentang sepanjang 2,3 ribu kilometer, perairan Pulau Lombok ditaksir menyimpan potensi lestari perikanan lebih dari 400 ribu ton dan potensi produksi lebih dari 100 ribu ton. Belum lagi terhitung potensi lainnya, seperti budidaya rumput laut, mutiara, kerapu, udang dan lobster. Sayangnya, selama lebih dari tiga dasawarsa membangun, potensi kelautan itu gagal tergali optimal. Dari data nilai ekspor NTB di tahun 2004 misalnya, tercatat total ekspor bernilai 974,6 ribu dollar Amerika. Dari total nilai itu, sektor kelautan hanya menyumbang kurang dari 1 %¹⁰.

Potensi pariwisata juga tak kalah memikatnya. Apalagi secara geografis, Lombok berdiri persis di simpang tujuan wisata utama dunia: Bali di Barat, Tana Toraja di Utara dan Kelimutu-Komodo di Timur. Ini juga didukung letak Pulau Lombok yang tepat berada di lintasan jalur terpadat "sabuk selatan" transnasional Banda Aceh-Kupang dan berposisi di lintas dua Alur Pelayaran Internasional (API) yaitu API I yang melintasi Selat Lombok dan API II yang melintasi Selat Timor.

Dari segi klimatologi atau sebaran iklim, Lombok juga unik. Pulau ini memiliki keseluruhan iklim yang ada di Indonesia, kecuali salju abadi seperti di puncak pegunungan Jayawijaya di Papua. Keberagaman iklim menjadikan Lombok tempat yang cocok bagi pengembangan pertanian dan perkebunan tanaman keras dengan berbagai jenis komoditas unggulan.

⁹ Ungkapan ini punya kisah sendiri. Pada 1982, seorang fotografer berkebangsaan Jerman menjelajahi Pulau Lombok. Dari Rinjani, hamparan sawah, air terjun, hingga pantai putih, ia rekam dalam lensa kamera. Begitu kagumnya juru potret dari Jerman itu, sampai ia merumuskan pulau Lombok dalam satu kalimat lumayan panjang tapi puitis. Begini kira-kira bunyinya: "*Tadinya planet bumi ini mengandung zat surga. Tetapi karena ulah manusia-manusia pendosa, zat surga itu diambil kembali Sang Kuasa. Untungnya, sempat ada yang tersisa. Dan itu yang kemudian menjadi Pulau Lombok*". Baca Bayu Windia, *Manusia Sasak* (Genta Pres, Yogyakarta: 2006).

¹⁰ *Tinjauan Perekonomian.....* 32

Dari sisi potensi modal sosial, masyarakat Lombok memiliki modal sosial yang besar, baik berupa nilai dan institusi lokal. Semestinya modal sosial itu bisa menjadi sumber daya mengerakkan perubahan konstruktif di tengah masyarakat. Sayangnya, seperti juga potensi sumber daya alam, potensi modal sosial itu gagal tergali dengan optimal. Tinggal menjadi potensi yang tersia-siakan.

Boks 1

Kisah Sarianten dan Monika

Namanya singkat saja Sarianten. Umurnya belum lagi genap 12 tahun. Bocah yang duduk di kelas akhir Sekolah Dasar (SD) negeri di desa Akar-Akar, Lombok Utara itu, mesti berjuang keras untuk cita-cita kecilnya: melanjutkan sekolah ke SMP negeri di kota kecamatan. Tekad Sarianten melanjutkan sekolah memang tinggi. Sekalipun ia tahu jika nanti cita-citanya terkabul, ia bakal menempuh jarak 10 kilometer pulang pergi berjalan kaki. Hanya masalahnya, cita-cita terancam gagal terwujudkan.

Penyebabnya, ia terlalu sering bolos sekolah, terutama di bulan Februari hingga April. Sepanjang bulan itu, Sarianten mesti membantu orangtuanya yang buruh tani mengarap lahan milik orang lain. Ia juga mesti menjaga tiga orang adiknya di gubuk mereka, sembari mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Orangtua sebenarnya tidak keberatan anaknya melanjutkan sekolah ke SMP. Tapi apa daya, tenaga Sarianten lebih diperlukan ketimbang kecerdasan otaknya. Lagipula, kemana hendak mencari biaya untuk menopang biaya lanjutan pendidikan anaknya. Walhasil balutan kemiskinan orangtuanya, membuat masa depan pendidikan Sarianten seperti berada di bibir jurang yang terjal.

Monika Zlastia, siswi baru di sebuah SMA negeri di Kabupaten Jembrana, Bali, tidak bisa menyembunyikan kegirangan hatinya. Padahal sebelum itu ia hampir selalu terlihat bermuram durja. Peralnya, lantaran kemiskinan orangtua, ia hampir saja gagal

melanjutkan pendidikan ke SMA. Syukurlah, sejak 2002 pemerintah Jembrana menanggung biaya sekolah dari SD sampai SMA negeri di sana. Setidaknya 44 ribu anak didik merasakan kegembiraan yang serupa. Orangtua hanya menanggung seragam sekolah dan beberapa jenis buku di luar buku paket yang sudah disediakan sekolah pula.

*Sepenggal kisah Monika dan Sarianten di atas menggambarkan cita-cita yang sama tidak selalu berbalas serupa. Monika lebih beruntung bisa menikmati “berkah” otonomi. Pemimpin di Jembrana sadar pendidikan merupakan hak setiap rakyat. Kesadaran itu kemudian terwujud dalam kebijakan yang memudahkan rakyat mendapat akses pendidikan. Sementara Sarianten, bernasib malang. Ia sekolah di sebuah kabupaten yang mungkin pemimpinnya punya kesadaran yang serupa. Hanya sial, kesadaran itu tidak diikuti tindakan nyata***

(Diolah dari KOMPAS, 3 April 2006 dan brosur *Semua Bisa Seperti Jembrana*, Yayasan Tifa, 2005)

BOKS sebaiknya pindah ke sebelum Potensi Tersia

Revitalisasi *Banjar*: Memulai dari yang dimiliki

Pada bagian prolog sudah disinggung bagaimana potensi modal sosial masyarakat Lombok gagal dikelola menjadi sumber daya yang menggerakkan perubahan konstruktif di tengah masyarakat. Salah satu dari modal sosial yang dimiliki masyarakat Lombok adalah intitusi lokal bernama *banjar*. Bagian ini akan mengupas apa yang dimaksud dengan gagasan revitalisasi *banjar* dan konteks sosial apa yang melatarbelakangi kemunculannya.

Sebelum menguraikan lebih jauh, tentu harus dimengerti dulu apa itu *banjar* dan bagaimana fungsinya di tengah masyarakat Lombok. Jika merujuk sejumlah kamus kita bisa temukan makna leksikal dari kata *banjar*. Kamus Kawi-Indonesia karangan Prof. Wojowasito misalnya, memaknai *banjar* sebagai “*baris; lingkungan*”. Hampir mirip dengan itu, kamus Jawa Kuno-Indonesia, susunan L. Mardiwarsito, mengartikan *banjar* dengan “*deret; jajar; baris atau binanjar*”. Sementara jika merujuk kamus Kawi-Jawa gubahan C.F. Winter Sr dan R. Ranggawarsita terbitan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, *banjar* atau *banjaran* diartikan sebagai “*urut atau urut-urutan*”. Menurut kamus Besar Bahasan Indonesia, kata *banjar* merujuk kepada makna “*jajar;deret;leret;baris*”. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memaknai *banjar* dengan arti “*bagian dari desa, setingkat rukun warga atau dukuh yang dikepalai seorang Kelian*”.

Dalam terminologi masyarakat Lombok, *banjar* dipahami sebagai “*persekutuan komunitas terkecil yang eksistensinya berada pada setiap gubug atau kampung,*” di mana di dalam *banjar* itu, secara spontan berlangsung kegiatan sosial kemasyarakatan warga selingkung.

Sebagai institusi asli masyarakat di gubug, usia *banjar* mungkin sama tuanya dengan usia gubug itu sendiri. Keseluruhan kepala keluarga dalam suatu gubug secara otomatis menjadi anggota *banjar*. Secara genealogis, anggota sebuah *banjar* dalam suatu gubug biasanya memiliki ikatan darah kekerabatan dari satu kakek atau nenek

buyut yang bersinggungan. Belakangan, seiring perkembangan zaman di mana proses kawin-mawin lintas gubug dan desa sering terjadi, cukup banyak juga orang di luar kekerabatan asal yang ikut menetap dalam suatu gubug. Ini memperluas keanggotaan *banjar*, tidak lagi semata berdasarkan asal-usul genealogis.

Masyarakat Lombok mengenal dua jenis *banjar*: *banjar mate* atau *banjar* kematian dan *banjar merariq* atau *banjar* perkawinan. Secara umum *banjar* di Lombok bercirikan antara lain:

1. berada di setiap kampung atau gubug
2. tidak mengenal manajemen pengelolaan tertulis
3. ketua dipilih secara musyawarah yang biasanya berdasarkan senioritas usia atau kharisma
4. kegiatan berjalan statis, hanya mengurus prosesi kematian dan pesta perkawinan warga *sebanjar*
5. keanggotaan berdasarkan primordialitas–genealogis
6. iuran anggota insidental dan spontan
7. nyaris tanpa ada pertemuan berkala
8. tidak memiliki bale *banjar*
9. tidak memiliki program berorientasi ke depan
10. cenderung menjadi organisasi warga yang konsumtif dan pasif.

Memperkuat Modal Sosial

Banjar di Lombok tumbuh dan berkembang sejak dahulu kala. Di dalamnya terpatikan semangat *besiru* yang menjadi spirit utama aktivitas *banjar*. *Besiru* adalah bentuk aktif dari kata *siru* yang bermakna “*ke-saling-an*”. Semangat *besiru* bersifat spontan, kolektif dan berlandaskan *reme*, yaitu sikap membantu atau menolong sesama dengan sukarela, senang hati dan ikhlas. Prinsip dasar yang menggerakkan *besiru* adalah keyakinan hidup memerlukan interaksi dan berbagi dengan sesama.

Semangat *besiru* inilah yang merupakan modal sosial *banjar*. Tetapi ia tidak cukup efektif menggerakkan perubahan sebab ia hanya muncul spontan pada momen

komunal tertentu saja yaitu saat kematian dan perkawinan. Di dua momen komunal itu, *banjar* berubah menjadi mesin yang begitu efektif menggerakkan energi sosial masyarakat untuk saling berbagi atas dasar spirit *besiru* tadi. Di luar dua momen komunal tadi, energi sosial masyarakat yang berlimpah tadi tidak terpancar.

Pada titik inilah gagasan revitalisasi *banjar* menjadi penting. Revitalisasi *banjar* bisa dimaknai sebagai upaya kreatif, sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat modal sosial yang ada di dalam *banjar*. Memperkuat di sini bisa bermakna memberi roh atau spirit baru. Bisa pula berarti mengembangkan roh atau spirit yang sudah ada. Sederhananya, gagasan revitalisasi *banjar* bertujuan menjadikan spirit *besiru* yang melahirkan energi sosial yang besar dan spontan di *banjar*, bisa terkelola untuk hal-hal yang produktif.

Boleh jadi muncul pertanyaan, apa perlunya revitalisasi *banjar* dilakukan? Apa perlunya spirit *besiru* di *banjar* diperkuat dan dikembangkan untuk hal-hal produktif? Gagasan revitalisasi *banjar* lahir sebagai jawaban terhadap persoalan sosial-kultural masyarakat, terutama di ranah pedesaan tempat di mana institusi *banjar* dominan berada. Lalu pertanyaan berikutnya, persoalan sosial-kultural apa yang hendak dijawab dengan gagasan revitalisasi *banjar*? Jawabnya: kemiskinan.

Kita tahu selama ini kemiskinan di desa lahir dari kebijakan pembangunan yang tidak memberi ruang yang sehat bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Tertutupnya akses pengelolaan sumberdaya melahirkan apa yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu sejenis kemiskinan kolektif yang lahir karena kebijakan pembangunan yang salah kaprah¹¹.

Kemiskinan struktural hanya mungkin dilawan dengan merombak total pendekatan pembangunan yang memposisikan desa hanya sebagai obyek pembangunan. Masyarakat desa harus menjadi subyek pembangunan diri dan lingkungannya, harus cakap merespon perubahan zaman, terlatih membangun orientasi masa depan, sabar dalam menjalani proses perubahan, dan terbangun kemandirian dan

¹¹ Baca Alfian dkk (editor), *Kemiskinan Struktural* (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1980)

tanggung jawab sosialnya. Untuk itu harus tersedia ruang partisipasi yang demokratis bagi masyarakat desa. Dalam konteks masyarakat Lombok yang masih terkesan patrimonial, ruang sosial kultural yang demokratis tidak mudah terbangun. Masyarakat Lombok terdidik hanya bisa menjadi makmum dari segelintir elit lokal yang karena “berkah” sosial-budaya memiliki posisi tawar yang lebih dominan. *Banjar* diyakini dapat mengisi ruang itu. Di *banjar* posisi masyarakat relatif sama dan setara. Tidak ada patron tidak ada klien. Semua anggota *banjar* bergerak atas panggilan hati dan rasa simpati ketika memberikan dukungan kepada sesama warga. Itulah konteks sosial-kultural yang menjadikan revitalisasi *banjar* memiliki makna signifikan.

Arti penting revitalisasi *banjar* sebagai ikhtiar membangun spirit *besiru* yang terkelola secara produktif, semakin kuat dengan besarnya realitas kemiskinan masyarakat pedesaan di Lombok. Mari kita lihat potret masyarakat lingkaran kawasan Hutan Rinjani sebagai sebuah contoh. Kawasan Rinjani adalah “urat nadi” Pulau Lombok. Di lembah, lereng dan kakinya yang subur bermukim sekurangnya 600 ribu jiwa. Populasi ini hampir setara dengan 22 % total populasi penduduk Pulau Lombok yang mencapai 2,8 juta.

Jika melihat potensi sumberdaya alamnya yang besar, semestinya masyarakat lingkaran Rinjani bisa hidup berkecukupan. Mereka punya hutan dan lahan pertanian yang subur. Tetapi faktanya dari 600 ribu jiwa yang tersebar di ratusan desa di tiga kabupaten itu, 60-70 % masuk dalam kategori miskin¹². Potret kemiskinan masyarakat lingkaran Rinjani, merupakan miniatur dari potret kemiskinan masyarakat pedesaan umumnya di Pulau Lombok. Mengutip data resmi pemerintah 27,7 % dari 2,8 juta populasi rakyat Lombok tergolong kelompok miskin. Mereka inilah penyumbang terbesar dari terpuruknya indikator *Human Development Indeks* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB di tingkat nasional.

¹² Untuk mendapatkan gambaran tentang potret kemiskinan masyarakat lingkaran Hutan Rinjani, baca Markum, Eko Bambang Sutedja, Muhammad Ridha Hakim, *Dinamika Hubungan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pulau Kecil: Kasus Pulau Lombok* (WWF Nusa Tenggara: 2004).

Di tahun 2002, NTB berada di peringkat 30 dari 33 provinsi dengan nilai IPM 57,8. Di tahun 2004, peringkat itu melorot menjadi nomor 33, padahal nilai IPM-nya naik menjadi 60,6. Kemudian di tahun 2005, posisi NTB naik satu tingkat di level 32 dengan nilai IPM 62,4. Menilik data IPM itu, jelas terpetakan sekalipun nilai IPM NTB naik terus sejak 2002 hingga 2005, tetapi kenaikan itu tidak cukup signifikan untuk melawan kemiskinan yang kompleks. Besarnya angka kemiskinan di Lombok jelas menunjukkan ada kebijakan struktural yang salah dalam proses pembangunan yang sedang berjalan¹³.

Sebagai Strategi Kultural Pembangunan Desa

Sampai di sini, sudah cukup jelas terurai apa yang dimaksud dengan gagasan revitalisasi *banjar* dan konteks sosial apa yang melatarbelakangi kemunculannya. Yang menjadi pemikiran selanjutnya adalah apakah gagasan revitalisasi *banjar* di Lombok ini cukup strategis untuk mempercepat pembangunan (demokratisasi) masyarakat desa di Lombok? Jawabnya sangat mungkin dengan didasari setidaknya pada tiga argumentasi berikut:

Pertama, institusi lokal seperti *banjar* ada di hampir semua komunitas pedesaan di tanah air. Sekalipun tentu saja nama dan konteks sosial-kultural yang melingkupinya tidaklah sama. Tetapi apapun nama dan konteks sosial-kultural yang melingkupinya, institusi lokal itu sama-sama merupakan modal sosial yang tumbuh dan berakar di tengah masyarakat lokal.

Kedua, gagasan revitalisasi *banjar* adalah bentuk konkrit dari penerapan otonomi di tingkat lokal (dusun). Jika otonomi kita maknai sebagai upaya mendorong partisipasi sadar dan kritis warga dalam mendorong perubahan diri dan lingkungannya, maka gagasan revitalisasi institusi lokal seperti *banjar* adalah jawabannya.

Ketiga, ide revitalisasi *banjar* membuktikan sejatinya masyarakat lokal di pedesaan masih punya harapan besar untuk mendorong perubahan secara mandiri. Mengam pengalamanan di Lombok mengajarkan, bukan barang yang mudah merevitalisasi institusi lokal yang sudah teramat lama terpasung dalam “penjara” pembangunan yang

¹³ Data IPM dikutip dari laporan BPS 2004 dan 2005.

serba sentralistik. Tetapi, dengan strategi yang tepat dan pelibatan penuh komunitas warga di *banjar* sebagai lokomotif perubahan, apa yang tidak mudah tadi, perlahan tapi pasti bisa membuahkan sesuatu yang mengembirakan. **

2

Revitalisasi *Banjar*: Sebuah Pengalaman

*“Mulai dengan apa yang diketahui rakyat
Bangun apa yang dimiliki rakyat
Ajari dengan kerja, belajar dalam kerja”*

(James Yen)

15 Juni 2007, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Sekitar 10 orang petani tembakau masih asyik berbincang di bale *banjar* Temolan, dusun Gerumpung, Desa Sepit, Lombok Timur. Banyak hal yang mereka bincangkan dengan antusias: pendidikan yang masih saja mahal, modal menanam tembakau yang belum lagi ada, sampai soal kriteria calon gubernur yang akan mereka pilih pada pilkada yang kian mendekat. “Harga minyak tanah kok tidak turun-turun, bagaimana kita akan bisa untung menjual tembakau nantinya,” keluh Amaq Jamiah (55), seorang petani tembakau yang memiliki lahan seluas 50 are.

Lain lagi keluhan Muhaili (45). Petani tembakau ini hampir kehilangan kepercayaannya kepada pemimpin. “Apa ada calon gubernur yang nanti kalau terpilih mau memikirkan agar bagaimana petani tembakau seperti kita ini tidak kesulitan modal menanam? Buktinya, gubernur sudah berganti berkali-kali, nasib kami tetap tak pasti,” gugat Muhaili.

Dialog tengah malam seperti itu, bukan satu dua kali terjadi di bale *banjar* Temolan. Di *banjar* ini dialog berlangsung setiap bulan. Sejak dibangun atas swadaya masyarakat pertengahan 2005, bale *banjar* itu menjadi ruang kultural tempat di mana rupa-rupa masalah, persoalan dan inspirasi masa depan warga diperbincangkan. *Banjar* Temolan adalah *banjar* generasi awal yang telah melakukan revitalisasi. Seorang budayawan Lombok berbagi pengalamannya tentang praktek revitalisasi tersebut,

termasuk strategi pendekatan yang digunakan dan proses pembentukan nilai terbangun di dalamnya.

Fase Inisiasi

Adalah Mochammad Yamin, seorang budayawan Lombok yang menjadi inisiator gagasan revitalisasi *banjar*. Ikhtiar itu setidaknya sudah ia lakukan sejak 1997. Bermula dari desanya sendiri, di Montong Betok, Lombok Timur. Dalam upayanya mendorong revitalisasi *banjar*, Yamin lebih banyak mengajak warga berdiskusi. Ia datang ke desa dan sama sekali tidak menggurui masyarakat.

Yamin sejak awal sadar sekali soal ini. Ia memilih membangun jaringan kecil tapi solid dengan beberapa aktivis sosial lokal yang memiliki keprihatinan yang sama melihat arah “terkucilnya” masyarakat desa di ranahnya sendiri. Yamin-pun tidak membayangkan gagasan revitalisasi *banjar* yang diusungnya, dalam akan lambat laun mengubah mentalitas masyarakat desa menjadi produktif. Secara bergurau Yamin sering menyebut dirinya sebagai seorang “*manipulator*”. “Saya tahu orang desa bangga dengan apa yang mereka bisa lakukan di *banjar*. Kebanggaan itu yang saya manipulasi untuk memberikan kesadaran baru tentang *banjar*,” terang Yamin.

Proses membangun kesadaran terjadi sangat pelan ditambah dengan mengubahnya menjadi sebuah aksi nyata, dan ini tidak semudah mengucapkan simsalabim. Bahkan di desanya sendiri, di Montong Betok, Lombok Timur, gagasan revitalisasi *banjar* gagal berjalan. Bukan lantaran gagasan itu tidak menarik perhatian, melainkan karena belum terbangunnya kepercayaan (*trust*) di antara anggota *banjar*. Rupanya, sekalipun dalam *banjar* tradisional, yaitu *banjar* kematian (*mate*) dan *banjar* perkawinan (*merariq*), *trust* antar sesama anggota masih ada, akan tetapi *trust* itu tidak cukup kuat untuk menopang bangunan *banjar* hasil revitalisasi.

Pengalaman dari Montong Betok menjadi pelajaran mahal. Ternyata revitalisasi *banjar* hanya mungkin berhasil jika nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas terbangun sejak awal. Karena dari situlah *trust* terbangun secara kelembagaan. Bukan *trust* yang

sudah membeku dan hanya terekspresikan saat seperti dalam praktek *banjar* tradisional.

Bermodal pengalaman dari Montong Betok, Yamin “menjajakan” gagasan revitalisasi *banjarnya* di desa lain. Tepatnya di Dusun Gerumpung, Desa Sepit, masih di Lombok Timur juga. Di dusun ini, seperti juga pengalaman di Montong Betok, gagasan revitalisasi *banjar* mendapat respon berlimpah. Tapi kali ini Yamin tidak tergoda untuk tergesa-gesa melangkah. Fase sosialisasi saja atau dalam bahasa Sasak disebut *becerite sole betenaq*, berlangsung hampir selama tiga tahun (1999-2001).

Selama kurun waktu itu, Yamin mendorong pelebagaan *banjar* menjadi lebih solid. Beruntung di kampung itu ada Nurhayadi, seorang guru muda berfikiran maju, yang secara aktif mendukung realisasi gagasan revitalisasi *banjar*. Keterlibatan aktor kunci, seperti guru desa, menjadi faktor penting memuluskan penerimaan warga terhadap gagasan revitalisasi *banjar*. “Saya melihat gagasan ini sederhana, tetapi besar dampaknya bagi masyarakat jika terlaksana,” terang Nurhayadi.

“Proyek” *banjar* di Dusun Gerumpung, kemudian menjadi praktek cerdas (*best practice*) awal bagaimana revitalisasi *banjar* seharusnya dijalankan. Pada Maret 2001, transformasi *banjar* Dusun Gerumpung menjadi *banjar* modern dimulai, ditandai dengan terbentuknya struktur kelembagaan *banjar*. Dari struktur kelembagaan yang terbangun, terlihat ide-ide progresif untuk menjadikan *banjar* sebagai institusi produktif. Di sana misalnya ada divisi kesehatan, pendidikan, dan usaha ekonomi produktif.

Pada waktu itu, disepakati juga nama *Temolan* sebagai nama *banjar* Dusun Gerumpung. Dalam bahasa Sasak, *Temolan* bermakna nilai-nilai luhur yang wajib dilestarikan. Mereka memulainya dari hal yang sederhana. 20 orang anggota memulai dengan iuran awal sebesar 10 ribu rupiah dan iuran bulanan yang ditetapkan seribu rupiah saja. Langkah sederhana ini memperlihatkan bagaimana anggota *banjar* *Temolan* mampu mengelola spirit *besiru* menjadi batu pijakan yang kokoh membentuk sikap kebersamaan dan kemandirian di antara mereka.

Uang hasil iuran itu dikumpulkan dan dipegang bendahara *banjar* atas pengetahuan ketua dan seluruh anggota. Secara berkala setiap bulannya, seluruh anggota *banjar* bertemu di bale *banjar*. Biasanya setiap tanggal 14 atau 15 hitungan bulan Arab (hijriah). Pada pertemuan itu iuran bulanan dikumpulkan. Biasanya, pertemuan bulanan ditutup dengan membaca do'a atau yasinan bersama bagi keselamatan warga dan leluhur yang telah tiada.

Selama hampir dua tahun, berdasarkan kesepakatan bersama yang ditetapkan dalam kearifan (*awik-awik*) *banjar* tidak ada transaksi pinjam-meminjam. Baru kemudian setelah dua tahun berjalan, seiring membesarnya jumlah anggota menjadi hampir 100 orang, transaksi pinjam-meminjam diperkenankan. Tak ada syarat yang rumit dalam transaksi pinjam-meminjam di *banjar* Temolan. Jumlah pinjaman diatur berdasarkan besarnya kas, lalu dibagi jumlah anggota. Setiap anggota hanya boleh meminjam untuk kepentingan yang produktif, seperti biaya pendidikan, kesehatan dan modal usaha. Tidak diijinkan sama sekali meminjam untuk kepentingan konsumtif. Pengembaliannya dicicil 4-5 kali dalam rentang waktu lima bulan. Bunga pinjaman ditentukan 2-3 % yang ditetapkan sendiri anggota *banjar* melalui *awik-awik*.

Perkembangan *Banjar* Temolan yang relatif cepat, membuat gagasan revitalisasi *banjar* mulai mendapat perhatian. Sejumlah lembaga memberikan perhatian khusus. Yayasan Kristen untuk Kesehatan (YAKKUM) mengucurkan bantuan dana stimulan untuk pembangunan bale *banjar*. Sebuah lembaga internasional, *Ashoka Foundation*, menjadikan Yamin sebagai fellow organisasi mereka. Mereka menilai Yamin adalah wirausaha sosial yang menjalankan gagasan kreatif melakukan perubahan mendasar di tingkat masyarakat terbawah. Sebagai fellow, sepanjang 2000-2005, Yamin mendapat dukungan pendanaan dan jaringan untuk mempercepat progresifitas gagasannya berkembang. Di tahun 2005, *Banjar* Temolan terpilih sebagai *role model* institusi lokal yang mampu melakukan penggalangan sumberdaya lokal berbasis warga negara.

Pembentukan Nilai

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, revitalisasi *banjar* yang bertujuan bagaimana spirit *besiru* (berbagi) yang spontan, berlimpah dan tanpa pamrih (*reme*) di *banjar* tradisional masyarakat Lombok, bisa terkelola lebih produktif dan permanen dalam bentuk yang terlembagakan. Tujuan ini hanya bisa tercapai jika terjadi proses pembentukan nilai (*value creation*) yang berkesinambungan dalam *banjar*.

Yamin sebagai inisiator gagasan revitalisasi *banjar*, sejak dini menyadari proses pembentukan nilai harus secara aktif melibatkan partisipasi anggota *banjar*. Bagi Yamin, proses pembentukan nilai bukan merupakan proses sekali jadi. Lebih tepat dimaknai sebagai proses mencoba dan mencoba (*trial by the error*). Anggota *banjar* diberikan kebebasan penuh merumuskan, menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kolektifitas mereka sesuai kebutuhannya. Yang terpenting tetap bersandar pada spirit dasar *banjar: besiru*.

Pengalaman revitalisasi *banjar* yang difasilitasi Yamin menunjukkan, pondasi mendasar dari proses pembentukan nilai di *banjar* adalah bagaimana kepercayaan (*trust*) terbangun. Jika *trust* sudah terbangun, maka pembentukan nilai di *banjar* akan mudah berjalan. Sebaliknya, jika *trust* rapuh, maka pembentukan nilai untuk mendorong *banjar* lebih produktif secara sosial-kultural sulit terwujud.

Trust bisa terbangun jika sejak awal proses revitalisasi *banjar* berjalan dengan transparan, demokratis dan mengedepankan kolektifitas. Individu, kelompok atau organisasi yang menjadi inisiator gagasan revitalisasi *banjar* jangan sampai turut campur terlalu jauh dalam proses pembentukan nilai di *banjar* sebab kalau itu terjadi, proses alamiah terbangunnya *trust* bisa terganggu. Proses pembentukan nilai di *banjar* dengan bermodalkan *trust*, diikuti pula dengan modernisasi kelembagaan *banjar*. Ini menjadi prasyarat penting bagi berjalannya gagasan revitalisasi *banjar*. Modernisasi kelembagaan akan melahirkan *banjar* dengan ciri baru. Ciri itu antara lain:

1. memiliki bale *banjar* sebagai ruang budaya.
2. menerapkan manajemen pengelolaan yang demokratis, partisipatif, akuntabel dan berpijak pada nilai-nilai musyawarah dan silaturahmi.
3. kepengurusan terstruktur berdasarkan kebutuhan dan dipilih secara demokratis.

4. program dirancang dan berorientasi kedepan dengan menekankan nilai-nilai kreatif, inovatif dan produktif.
5. keanggotaan terbuka bagi setiap warga selingkungan.
6. adanya iuran anggota secara berkala.
7. memiliki seperangkat kearifan lokal yang menjadi pegangan. Dalam kultur Sasak di Lombok dikenal dengan *awik-awik*.
8. berbentuk institusi lokal yang dilembagakan.

Bale Banjar: Ruang Budaya

Salah satu yang menjadi “ikon” revitalisasi *banjar* adalah gagasan Yamin tentang bale *banjar* sebagai ruang budaya. Dalam benak Yamin, membangun Indonesia bukan sekadar membangun wilayah geografis belaka, tetapi justru yang penting adalah membangunnya sebagai wilayah budaya. Budaya dalam pengertian di sini lebih dari sekadar tradisi atau kesenian, melainkan juga budaya dalam makna nilai dan pranata. Untuk membangun wilayah budaya itulah, penting sekali ruang budaya yang mengedepankan penghargaan terhadap pluralisme dan demokrasi. Ruang budaya itu harus dikreasikan sendiri secara mandiri, kreatif dan berswadaya dari, oleh dan untuk masyarakat. Dalam konteks itulah Yamin melihat bale *banjar* adalah ruang pembelajaran, yaitu ruang budaya bagi masyarakat *banjar*, tempat di mana mereka membangun wilayah budayanya yang menghargai pluralisme dan demokrasi.

Secara fisik bangunan bale *banjar* merupakan ruang terbuka, tanpa sekat dan pembatas. Ini berbeda dengan bangunan rumah tangga yang secara psikologis bersekat sebagai simbol hirarki antara orangtua dan anak-anak; berbeda pula dengan bangunan surau atau mesjid yang kental dengan nuansa sakral. Bangunan fisik berupa ruang terbuka, tanpa sekat dan pembatas, menjadikan bale *banjar* sebagai simbol yang mencerminkan adanya kemandirian, kesetaraan dan egalitarian sebuah *banjar*. Di bale *banjar*, dialog berlangsung bebas dan bertanggung jawab. Laki-perempuan, tua-muda, besar-kecil, kaya-papa, bangsawan-jelata dan penguasa atau rakyat umumnya mendapat ruang berekspresi yang sama.

Sebagai ruang kultural, bale *banjar* mutlak ada dalam sebuah *banjar*. Pengalaman revitalisasi *banjar* di Lombok menunjukkan, kehadiran bale *banjar* mendorong lahirnya gairah yang besar dari warga untuk mengorganisir dan menghimpun diri, mengatasi perbedaan yang ada secara lebih dewasa demi kepentingan kolektif mereka. Sesuai dengan karakternya sebagai ruang publik yang demokratis, bale *banjar* menjadi tempat atau wadah yang tepat untuk membangun nilai-nilai kultural yang konstruktif bagi pendewasaan warga. Tentu saja disesuaikan dengan kultur masyarakatnya masing-masing. Di Lombok misalnya, dengan kultur masyarakatnya yang mayoritas muslim, bale *banjar* sangat mungkin memainkan peran konstruktif dalam turut membangun komunitas muslim yang demokratis. Di *banjar* Temolan misalnya, secara berkala bale *banjarnya* berfungsi sebagai ruang dialog, diskusi dan kajian-kajian Islam. Di sini juga pendidikan pranikah bagi calon pengantin, taman pendidikan agama bagi anak-anak, dan pengajian tafsir Qur'an dilakukan.

Sebagai ruang budaya, bale *banjar* juga berperan memproduksi seperangkat kearifan lokal yang dalam bahasa Sasak disebut *awik-awik*. Dalam konstelasi kehidupan desa, *awik-awik* sering lebih efektif menegakkan bangunan sosial masyarakat ketimbang hukum formal buatan negara. Ini mungkin karena sifatnya yang fleksibel dan semangatnya yang bukan menghukum tetapi mendidik. *Awik-awik* pun bisa menyentuh wilayah yang tidak tersentuh hukum formal.

Dalam konteks pendidikan gender, bale *banjar*, dengan spiritnya yang demokratis, menjadi ruang yang kondusif menumbuhkembangkan potensi dan apresiasi kaum perempuan desa. Bagi kaum perempuan desa, bale *banjar* menjadi ruang yang membawa keakraban. Di sana mereka tidak tertekan secara psikologis dengan sekat perbedaan gender yang kerap terasa di ranah lainnya, termasuk dalam pergaulan rumah tangga dan antar keluarga. Di bale *banjar* perempuan berinteraksi setara dengan laki-laki. Gagasan, pikiran dan problematika mereka juga mendapat ruang yang sama untuk diperbincangkan dan dicarikan jalan keluar.

Sampai di sini kita sudah mengupas bagaimana gagasan revitalisasi *banjar* direalisasikan. Dimulai dari upaya menjajarkannya, strategi pendekatannya, proses pembentukan nilai berkelanjutan dan tentang bale *banjar* sebagai ruang budaya, sampai pelembagaan *banjar* hasil revitalisasi. Selanjutnya pada bagian berikutnya, akan dipaparkan sekelumit dampak konkrit dari revitalisasi *banjar* dan apa pula tantangan pengembangan gagasan ini ke depan.

Boks 2

Awik-Awik Kawin-Cerai

Kisah ini tentang bagaimana pembentukan nilai baru terjadi di banjar. Suatu kali, di banjar Banjaransari Desa Montong Betok, Lombok Timur, seorang warga banjar melangsungkan pernikahan. Seperti biasa, banjar memberikan dukungan spontan. Belum lagi genap setahun, perkawinan anggota banjar tadi berantakan. Perceraian pun tak terhindarkan. Tak jelas benar apa pangkal penyebabnya. Kurang lebih sebulan berselang, anggota banjar itu mengutarakan niatnya untuk menikah lagi dan meminta dukungan banjar.

Warga banjar terpecah dua sikapnya. Mereka lalu berembuk, tukar pikiran, adu argumentasi di bale banjar. Yang mendukung beralasan perceraian dan perkawinan adalah hak individu. Jadi banjar tidak boleh mencampuri hak itu. Sebaliknya yang menolak menyatakan, memang perkawinan dan perceraian adalah hak individu, tetapi banjar harus bisa menentukan sikap terhadap perilaku kawin cerai yang cenderung permisif dilakukan.

Akhirnya, setelah cukup lama berdebat disepakati sebuah kearifan lokal (awik-awik) tertulis. Isinya tegas dan lugas: banjar Banjaransari desa Montong Betok tidak akan pernah mendukung perkawinan kedua, ketiga atau seterusnya yang berawal dari proses perceraian yang tidak jelas sebab-musababnya. Memang perkawinan anggota

banjar tadi tetap terlaksana, banjar pun tetap dengan sikapnya: tidak memberikan dukungan. Sekalipun tentu saja secara pribadi, anggota banjar ikut merayakan perkawinan sejawatnya itu.

Apa arti penting awik-awik yang lahir dari kasus di atas? lahirnya awik-awik semacam ini, jelas merupakan upaya kreatif mendidik masyarakat agar tidak mudah kawin cerai. Kebiasaan kawin-cerai memang menjadi realitas umum di masyarakat pedesaan di Lombok. Sampai muncul sindiran satir: musim panen kawin, musim paceklik cerai. Dampaknya tampak nyata, banyak perempuan menjadi janda di usia muda. Tidak hanya janda satu kali, tetapi banyak yang janda berkali-kali.

*Di masyarakat pedesaan di Lombok, kita mudah menemukan tiga generasi perempuan: nenek, ibu dan anak perempuannya tinggal dalam satu rumah yang sama. Neneknya janda, ibunya janda dan anak perempuannya bisa jadi juga calon janda. Dampak lainnya, kesejahteraan keluarga hasil kawin-cerai ini sudah pasti memprihatinkan. Terutama nasib kaum perempuan dan anak-anak mereka***

Revitalisasi *Banjar*: Perluasan Cakupan

Kalau dihitung dari sejak awal gagasan revitalisasi *banjar* dirumuskan sampai direalisasikan, kurun waktu yang terbentang baru sekitar 5-6 tahun. Secara kuantitatif, jumlah *banjar* yang melakukan revitalisasi relatif terbatas. Setidaknya kalau dibandingkan dari besarnya prediksi jumlah *banjar* yang ada di Pulau Lombok.

Di pulau Lombok, menurut data BPS 2005, ada sekitar 400 desa. Jika kita ambil rata-rata satu desa memiliki 5-6 dusun atau gubug dan bila di setiap dusun atau gubug itu ada *banjar*, berarti paling kurang ada 2.000 *banjar*. Bayangkan, jika 30 % saja bisa didorong melakukan revitalisasi, niscaya dampaknya akan terasa signifikan bagi masyarakat pedesaan.

Fakta terbatasnya jumlah *banjar* yang melakukan revitalisasi, jelas merupakan tantangan yang harus dijawab secara cerdas dan kreatif. Tetapi dibalik itu, dari sedikit *banjar* yang telah melakukan revitalisasi terlihat sejumlah dampak yang signifikan. Bagian ini akan memaparkan sejumlah dampak dari revitalisasi *banjar*.

Pendidikan Untuk Semua

Kita tahu selama ini pendidikan adalah hak rakyat yang paling sering terabaikan. Padahal pendidikan boleh dikatakan satu-satunya kendaraan yang paling memungkinkan mobilisasi vertikal untuk mendorong perubahan nasib kaum miskin di pedesaan. Jika pendidikan terenggut dari genggam tangan mereka, hampir pasti tidak tersedia lagi akses bagi mereka menggapai kemajuan.

Orang bilang abad 21 adalah abad persaingan manusia. Jika kita sepakat dengan itu, mestinya akses pendidikan bagi masyarakat desa mutlak mereka dapatkan. Bukankah lebih dari 70 %, populasi rakyat republik ini ada di desa? Masyarakat desa dengan pendidikan ala kadarnya, hanya akan menjadi pemain pinggiran. Mereka persis seperti katak dalam tempurung, berlutut pada dunianya yang terbatas. Bahkan di dunia yang sudah terbatas itu, mereka juga tidak berdaya.

Bangsa-bangsa yang kini berdiri pada garis depan kemajuan, adalah bangsa-bangsa yang sejak lama sadar dan berikhtiar keras menyiapkan sumberdaya manusianya melalui pendidikan. Mereka sadar, *Globalization is not a threat, but an opportunity*. Globalisasi bukan musuh, tetapi peluang, momen dan ruang bagi setiap negara untuk maju dan menjadi makmur. Syaratnya: siapkan manusia yang cerdas, trampil dan inovatif.

Tidak ada yang menyangkal berinvestasi pada sektor pendidikan mahal dan butuh waktu lama untuk bisa berbuah. Orang China bilang kalau menanam sayuran hasilnya dalam setahun baru mungkin dipetik. Kalau menanam buah hasilnya berbilang tahun baru panen. Kalau menanam manusia, hasilnya bisa 100 tahun baru terasa. Sekalipun begitu, bangsa-bangsa yang maju pemikirannya, tidak pernah merasa terhalang untuk berinvestasi di sektor pendidikan.

Sebaliknya, hanya bangsa yang bebal sajarah yang tidak serius membangun manusianya melalui investasi pendidikan. Bangsa seperti ini hanya akan jadi bangsa yang lemah lunglai tanpa daya saing. Lantaran rakyatnya terbelakang karena tidak mendapat akses pendidikan yang layak. Sekalipun pahit, harus dikatakan Indonesia termasuk bangsa yang bebal itu.

Uraian panjang di atas menjadi penting diterangkan dalam kaitannya dengan mengapa revitalisasi *banjar* sangat menekankan pembenahan sektor pendidikan anggotanya. Ketika mengusung gagasan revitalisasi *banjar*, Yamin percaya, *banjar* bisa menjadi institusi kecil di dusun atau gubug yang efektif mengelola modal sosial warga untuk hal-hal produktif. Salah satunya yang terpokok adalah perkara pendidikan.

Di *banjar* pendidikan berlaku untuk semua anggota *banjar*. Ini misalnya terlihat dalam aktifitas di *Banjar* Temolan, Dusun Gerumpung, Desa Sepit, Lombok Timur. Sejak 2006, anak-anak di dusun itu mendapat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bale *banjar*. Pendidikan informal juga diberikan, seperti pendidikan agama buat anak-anak, pembacaan dan pembahasan lontar, pendidikan pranikah untuk remaja, dan pelatihan singkat beberapa ketrampilan.

Semua kegiatan itu dibiayai dari hasil swadaya iuran bulanan anggota *banjar*. Dari iuran itu pula, *Banjar* Temolan bisa memberikan dukungan pendanaan bagi anak-anak anggota *banjar* yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi. Banyak dari anak anggota *banjar* yang bisa lulus SMA dan perguruan tinggi karena bantuan pendanaan *banjar*.

Di *banjar* masalah pendidikan warga dipecahkan dengan prinsip sederhana tapi jitu: non subsidi, swadaya dan berkelanjutan. Non subsidi artinya, *banjar* tidak pernah menggantungkan aktifitas pendidikannya kepada subsidi kelompok lain, baik pemerintah atau kelompok mana saja. Sikap ini bukan berarti *banjar* anti atau menolak bantuan, melainkan untuk menegaskan bantuan hanya faktor pelengkap saja dalam aktifitas *banjar*. Sikap ini berkaitan erat dengan prinsip swadaya yang menekankan betul kemandirian. Sementara prinsip berkelanjutan mengandung pesan bahwa melalui aktifitas pendidikan, *banjar* mendorong keberlanjutan masa depan warganya.

Dampak yang termahal nilainya, dari aktifitas *banjar* mengelola pendidikan warga, adalah menguatnya kesadaran bahwa pendidikan adalah masalah kolektif yang harus dipikirkan bersama jalan keluarnya. Kenyataan bahwa pendidikan mahal dan kerap kali rakyat miskin tidak mampu mengenyamnya, adalah kenyataan yang menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat desa.

Selama ini, persoalan itu mereka tanggung sendiri-sendiri. Banyak dari mereka yang kemudian memutuskan melupakan mimpi indah untuk meraih pendidikan buat anak-anaknya. Melalui *banjar*, harapan kolektif warga tumbuh kembali. Mereka mulai percaya, melalui spirit *besiru* yang ada di *banjar*, beban pendidikan bisa mereka bagi bersama.

Boks 3

Faridah dan Talet Embas Nyiur

Suatu sore, pertengahan Maret 2007, cuaca sedikit mendung, seorang perempuan muda terlihat asyik bermain dengan belasan anak usia balita. Perempuan

muda itu, biasa disapa ibu guru Faridah. Ia memang guru bagi anak-anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola Banjar Temolan. Faridah baru saja lulus dari sebuah Sekolah Tinggi Pendidikan di Mataram, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selama menyelesaikan kuliahnya, Faridah banyak dibantu banjar. Orangtuanya sering meminjam dana kepada banjar untuk modal pendidikan Faridah. "Saya mengajar di sini tanpa paksaan. Saya berhutang kepada banjar. Inilah cara saya membalasnya," terang Faridah.

Meminjamkan dana buat anak-anak sekolah adalah kegiatan berkala di Banjar Temolan. Selain itu ada lagi kegiatan produktif pendidikan lainnya, yaitu mendorong budaya menabung anak-anak. Dananya diambil dari uang saku pemberian orang tua mereka. Jumlahnya tidak besar memang, tetapi dengan menanamkan prinsip lokal Lombok: Talet Embas Nyiur yang makna harfiahnya membibit dan menanam bibit kelapa, tetapi makna kulturalnya menanam sekarang untuk masa depan anak cucu. Prinsip inilah yang didikkan pada anak-anak dengan praktek menabung saat ini, menjadi investasi mereka di masa depan. Sudah disepakati bersama antara anggota banjar, tabungan anak-anak itu akan diperuntukkan bagi biaya sekolah mereka kelak. Jadi tidak akan dicairkan dalam rentang waktu yang panjang**

Boks 4

Swadaya untuk Madrasah

Anggota banjar Beriuk Dayung di Dusun Batu kijuk, Sekotong, Lombok Barat gundah. Pasalnya, mereka melihat proses belajar mengajar di madrasah desa tersendat-sendat. Padahal itulah satu-satunya madrasah yang ada di sana. Usut punya usut, ternyata honor guru yang tak pasti menjadi salah satu penyebab utamanya. Padahal honor itu sudah kecil jumlahnya.

Warga banjar berembuk. Hasilnya, mereka sepakat melakukan beberapa hal. Salah satu yang menarik adalah kesepakatan yang mereka tuangkan dalam awik-awik untuk secara rutin setiap bulannya menyumbangkan uang untuk honor para guru

*madrasah. Jumlahnya tidak dibatasi, tetapi minimal seribu rupiah. Kewajiban ini berlaku bagi semua anggota banjar tanpa terkecuali, termasuk anggota banjar yang tidak memiliki anak yang sekolah di madrasah itu. Untuk itu, masyarakat berhak “mengejek” anak-anak dan orangtua dari anak yang tidak sekolah. ***

Penguatan Ekonomi

Pembangunan berorientasi pertumbuhan, melahirkan ketimpangan dan ketergantungan. Masyarakat pedesaan merasakan sekali hal ini. Desa bukan hanya gagal berkembang menjadi pusat ekonomi yang mandiri, melainkan juga semua potensi sumberdaya mereka terhisap. Kota tumbuh sebagai sentral pertumbuhan, sementara desa sebagai sentral kegiatan pertanian begitu tertinggal.

Guna menjawab hal tersebut desa perlu memperkuat kembali ekonomi masyarakatnya untuk bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Penguatan ekonomi masyarakat desa tidak mungkin bisa efektif jika spiritnya masih berdasarkan “belas kasihan” atau sekadar bantuan karikatif. Yang dibutuhkan masyarakat desa adalah dukungan konstruktif berupa terbukanya akses bagi mereka untuk mengelola sumberdaya bagi kepentingan ekonomi mereka.

Sebagai institusi lokal di tingkat gubug atau dusun, *banjar* merupakan alat yang efektif untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa. Sumberdaya lokal bisa terkelola di *banjar*. Gambaran ini yang misalnya tampak dari pengalaman *Banjar* Temolan. Sebelum *Banjar* Temolan terbentuk, warga umumnya akrab dengan bank subuh atau bank *rontok**, yaitu sejenis rentenir partikelir yang banyak beroperasi di desa-desa dan biasanya sudah mengetok pintu rumah warga pada waktu subuh.

Sekalipun banyak warga yang paham bahwa lebih banyak ruginya jika menggunakan jasa bank subuh, tetapi karena tak ada pilihan lain sementara kebutuhan hidup kian mendesak, bank subuh pun laris manis. Kehadiran *banjar* dengan kegiatan simpan-pinjamnya, sekalipun belum total menghapus praktek bank subuh, sekurangnya membuat warga desa punya pilihan alternatif untuk meminjam uang.

Dalam bidang ekonomi, tujuan jangka panjang *banjar* adalah bagaimana bisa meretas akar kemiskinan. Untuk itu, selain memberikan pinjaman modal, *Banjar* Temolan juga mencoba memulai usaha-usaha produktif, seperti antara lain membuka warung sembako. Modalnya didapat dari kas *banjar* dan sumbangan donatur. Pada mulanya, usaha ini berkembang pesat. Tidak hanya anggota *banjar*, warga masyarakat lainnya juga merasakan manfaatnya. Sayangnya, belakangan usaha ini berhenti. Penyebabnya, terbatasnya kemampuan manajemen dan rendahnya etos wirausaha.

Memang tidak mudah menjadikan masyarakat desa mampu melakukan usaha-usaha ekonomi produktif. Kebutuhan masyarakat desa, sejatinya sederhana saja. Semestinya kebutuhan itu mampu terpenuhi dengan potensi sumberdaya mereka sendiri, tetapi karena kemampuan yang berkaitan dengan ketrampilan dan kreatifitas mereka minim, sumberdaya yang ada gagal dikelola dengan optimal. *Banjar* harus bisa menjadi wadah tempat di mana spirit wirausaha warga ditumbuhkembangkan.

Menyadari itu, belakangan *Banjar* Temolan mulai merintis sejumlah pelatihan ketrampilan sederhana dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di desa. Pembekalan teknis menyangkut manajemen usaha juga diberikan. Akses permodalan kepada pihak ketiga, seperti perbankan dan lembaga lainnya mulai dirintis. Ini tentu saja bukan pekerjaan gampang. Hampir tidak ada lembaga permodalan yang melihat bahwa di *banjar* ada potensi penguatan ekonomi warga yang besar. Di *banjar* ada modal kebersamaan, kemandirian, dan saling percaya (*trust*) yang jika dikelola maka akan jadi modal sosial membangun basis ekonomi warga.

Boks 5

Kesaksian Inaq Ijah

Perempuan separuh baya itu biasa disapa Inaq Ijah. Tidak banyak orang yang tahu lagi siapa nama aslinya. Ijah adalah nama anak perempuannya, sementara Inaq dalam bahasa Sasak bermakna ibu. Seperti kebiasaan orang Sasak yang melekatkan nama anak pertama untuk panggilan dirinya, ia pun disapa Inaq Ijah. Perempuan ini

tidak lulus sekolah dasar. Beruntung ia bisa membaca dan menghitung. "Itulah modal saya menjadi seorang pedagang bakulan begini," katanya suatu pagi sebelum keliling berjualan.

Inaq Ijah hidup dengan suaminya, seorang peracik obat tradisional yang kerap juga diminta warga menjadi juru suntik seperti layaknya mantri kesehatan. Dua anak laki-lakinya menjadi tenaga kerja ke Malaysia dan sudah dua tahun lebih belum juga pulang. Seorang anak perempuannya baru saja menikah dan masih ikut menumpang dengannya.

Sebagai pedagang keliling Inaq Ijah boleh dibilang kreatif. Ia sudah menjalani profesinya itu hampir 10 tahun. Nyaris tak ada produk yang tak bisa jadi dagangan di tangannya. Dari terasi sampai kursi, dari jarum pentul hingga bantal guling, dari sandang hingga gelas dan piring. Ia pun melayani jual beli secara barter, sewa-menyewa dan sistem kredit dengan bunga lunak dan berjangka panjang. Bagi warga Desa Sepit dan desa sekitarnya di Lombok Timur, Inaq Ijah bisa menjadi jalan keluar untuk mendapatkan keperluan mereka dengan cara mudah dan cepat.

*Sebagai pedagang bakulan keliling, Inaq Ijah tahan banting. Permodalan yang minim tidak membuatnya patah arang. Belakangan ia merasa sangat tertolong karena mendapat pinjaman berbunga rendah dan berjangka panjang dari Banjar Temolan. Inaq Ijah memang adalah anggota banjar. Ia masuk pertama kali sekitar tahun 2000. Sejak itu ia sudah tiga kali meminjam modal di banjar. Mula-mula 500 ribu, lalu kemudian 1 juta dan belakangan bertambah menjadi 1,5juta. "Coba kalau saya pinjam di bank subuh, bisa terjerat bunga besar dan tenggang waktu yang mepet," ujar Inaq Ijah***

Membangun Etos

Gunnar Myrdal seorang ahli ekonomi Swedia peraih hadiah nobel, mengelompokkan Indonesia sebagai negara lunak (*soft states*), karena Indonesia dianggap gagal menumbuhkan etos masyarakatnya. Etos masyarakat Indonesia dinilai rendah. Cirinya tercermin dari miskinnya keyakinan diri, minimnya kompetensi, rapuhnya integritas, terbatasnya kreatif-inovasi, kurangnya komitmen-tanggung jawab, sulitnya memegang amanah, dan rendahnya budaya hemat (Sinamo: 2005).

Sementara penting sebuah negara menumbuhkan etos masyarakatnya, karena tanpa masyarakat yang beretos tinggi, hampir mustahil sebuah negara menjadi maju dan makmur. Banyak contoh negara yang mampu berkembang karena berhasil menumbuhkan etos rakyatnya. Jepang misalnya, maju karena etos hemat dan kerja kerasnya. Bangsa Eropa begitu pula, maju karena etos disiplin, rasional, dan bekerja dengan orientasi meraup sukses sehingga sabar menjalani proses.

Timbul pertanyaan, bisakah kita menumbuhkan etos masyarakat menjadi lebih tangguh? Sangat mungkin jawabnya. Upaya revitalisasi *banjar* sampai batas tertentu, sudah mencoba mendorong lahirnya komunitas masyarakat dengan etos yang produktif. Etos untuk bersikap hemat misalnya, ditumbuhkan melalui kegiatan menabung dan iuran berkala di *banjar*. Etos bersikap terbuka dan berfikir rasional, dipupuk melalui kebiasaan bertemu dan berdiskusi di bale *banjar*. Etos kreatif dan inovatif dirangsang dengan berbagai pelatihan ekonomi dan kesenian.

Etos berlaku mandiri dan bersabar dengan proses, ditunjukkan dengan semangat *talet embas nyiur* yang mengajarkan warga *banjar* untuk yakin tidak ada yang datang sontak dengan tiba-tiba menjadi besar. Semua butuh proses, perlu ikhtiar dan investasi jangka panjang. Dalam konteks ini, *banjar* sudah mendidik warganya untuk tidak bermental terabas, mendapat sesuatu dengan jalan pintas yang seringkali bertentangan dengan norma dan nilai kepatutan.

Boks 6

Bantuan dan Etos Kemandirian

Soal bantuan memang kerap kali seperti pisau bermata dua bagi Banjar. Suatu kali di tahun 2003, tiga tahun setelah Banjar Temolan berdiri, Bupati Lombok Timur memberikan bantuan dana pengembangan sebesar 10 juta rupiah. Kala itu anggota banjar sudah mencapai hampir 100 orang dengan dana swadaya mencapai 15 juta rupiah. Menyikapi bantuan bupati, sikap anggota banjar terbelah dua. Sebagian menghendaki uang itu dibagi rata saja kepada seluruh anggota banjar. Sebagian yang

lain menginginkan bantuan bupati tadi dikelola menambah modal bagi dana bergulir untuk pinjaman pendidikan dan kesehatan anggota banjar.

Mereka yang meminta bantuan bupati dibagi rata, jelas berfikir pragmatis. Bagi mereka bantuan seperti rezeki yang harus segera dinikmati. Sementara bagi kelompok yang menolak, berpandangan bantuan itu harus dikelola untuk kemajuan banjar. Perdebatan berlangsung cukup lama. Bahkan menjurus kepada potensi perpecahan di antara anggota. Beruntung spirit kebersamaan masih kuat mengawal.

Semua anggota banjar kemudian sepakat merumuskan awik-awik yang mengatur setiap pengelolaan bantuan. Dalam awik-awik ditekan betul eksistensi banjar harus bertumpu kepada semangat kemandirian, swadaya dan kebersamaan anggota. Ditekankan pula, bantuan bukan tujuan. Bantuan hanyalah sarana yang mendukung banjar mencapai tujuannya. Sejak saat itu, sebesar apapun bantuan yang datang, tidak ada lagi pertentangan sikap dan pandangan. Banjar berhasil menjaga etos kemandirian anggotanya.

Revitalisasi *banjar*: Sebuah Tantangan

Gagasan revitalisasi *banjar* belum lagi separuh berjalan. Di depan menghadang sejumlah tantangan. Tantangan ini harus dikelola menjadi peluang yang memperbesar ruang sosial-politik bagi tumbuh kembangnya gagasan revitalisasi *banjar*.

Secara umum tantangan terhadap *banjar* berupa tantangan struktural dan kultural. Tantangan struktural bisa berupa ketidakpercayaan struktur resmi pemerintah jika sebuah *banjar* mengelola hal-hal diluar apa yang secara tradisi menjadi wilayah garapannya. Ketidakpercayaan ini lalu berimbas kepada dukungan setengah hati atau bahkan klaim sepihak jika *banjar* menunjukkan dirinya mampu mengelola potensi energi sosial warganya untuk hal-hal yang lebih produktif.

Sementara kendala kultural bisa datang dari sikap mental warga *banjar* sendiri yang merasa *banjar* tidak mungkin mampu mengerjakan hal-hal diluar ranah tradisionalnya, yaitu kematian dan perkawinan. Sikap mental yang “terpasung” ini kerap kali dijumpai pada fase awal revitalisasi dan biasanya kian berkurang tatkala revitalisasi *banjar* pelan-pelan mulai membuahkan bukti. Tetapi sebaliknya, sikap mental yang tidak percaya diri ini bisa menguat jika proses pembentukan nilai dalam revitalisasi *banjar* mandeg atau stagnan.

Intervensi Negara

Suatu ketika, PAUD *banjar* Temolan berniat mencari bantuan dana pengembangan ke dinas pendidikan kabupaten. Usaha ini dilakukan karena memang tersedia dana untuk itu dari pemerintah pusat. Tetapi apa lacur, bukan dana yang didapatkan melainkan intervensi yang justru menyulitkan. Dinas pendidikan mewajibkan PAUD *banjar* Temolan memiliki akte notaris lengkap dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Tanpa perlengkapan administrasi itu, PAUD *banjar* Temolan tidak mendapat pengakuan resmi negara dan tertutup baginya memperoleh dukungan dana.

Pengalaman lain didapatkan di salah satu *banjar*, setelah merevitalisasi diri, tergelarlah di sana beragam aktivitas warga: PAUD, taman bacaan, kelompok tani, arisan ibu-ibu, dan yasinan berkala. Melihat geliat *banjar* seperti itu, kepala dusun meminta agar *banjar* lainnya di desa itu bergabung dan membentuk semacam Forum *Banjar*. Namun kemudian pemerintahan dusun menghendaki Forum *Banjar* tadi dikendalikan secara struktural di bawah pemerintahan dusun, sekaligus menjadikan kepala dusun sebagai ketua *banjar* yang baru.

Dua contoh kecil di atas, merupakan gambaran bentuk intervensi negara yang kontraproduktif mendukung revitalisasi *banjar*. Tentu saja, Intervensi negara bukannya haram dilakukan, bahkan wajib sifatnya. Persoalannya, bagaimana bentuk intervensi itu sepatutnya dilakukan. Agar ia benar-benar membangun bukan membuat mandul apalagi mematikan potensi lokal masyarakat di *banjar*.

Sekarang kita masuk di zaman otonomi yang semangat dasarnya membuka, membagi dan memberi peran yang lebih dominan bagi kekuatan lokal untuk mengelola potensi dirinya sendiri. Semangat ini hanya bisa terealisasi baik jika pemerintah memformat ulang peran dan fungsinya di tengah masyarakat. Jika di zaman pembangunan sentralistik dahulu, pemerintah menjadi aktor dominan bahkan aktor tunggal yang merumuskan arah pembangunan masyarakat, maka di zaman otonomi pemerintah mesti berlapang hati menjadi aktor yang berdiri di belakang menjadi fasilitator dan dinamisator pembangunan masyarakat.

Peran sebagai fasilitator dan dinamisator itulah bentuk nyata intervensi negara yang sehat dan konstruktif bagi pembangunan potensi lokal masyarakat seperti di *banjar*. Dengan memainkan peran itu, pemerintah berposisi menjadi mitra bagi masyarakat. dan bukan lagi sebagai kekuatan yang datang dengan kebijakan yang mau tidak mau harus dijalankan masyarakat, tanpa mau tahu apakah kebijakan itu menumbuhkembangkan potensi masyarakat atau malah memandulkannya.

Dahulu para pendiri bangsa membayangkan Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini jelas membayangkan sebuah negara yang mengelola potensi dirinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menuju

kesana tata kelola negara mesti berdiri di atas prinsip partisipasi, transparansi dan kemandirian rakyatnya sendiri. Tugas negara adalah memfasilitasi akses dan membuka ruang dinamisasi agar potensi rakyatnya tumbuh dengan wajar, sehat dan berkesinambungan.

Sialnya, di zaman otonomi kini, kebiasaan melakukan intervensi yang kurang produktif masih juga sering dilakukan negara. Bentuk yang kasat mata bisa kita lacak dari kegemaran pemerintah dari pusat sampai daerah membuat, merekayasa dan melahirkan beragam institusi baru di desa. Setiap program pembangunan ada wadah barunya di desa. Desa menjadi “pasar” yang ramai dengan aneka rupa institusi buatan negara. Seakan-akan orang desa tidak memiliki institusinya sendiri. Seakan-akan pula, jika negara membuat institusi, maka semua masalah orang desa mendapat tempat untuk tersalurkan. Pandangan ini yang melahirkan intervensi yang tidak pada tempatnya.

Penguatan Kelembagaan

Sebagai institusi lokal yang bergerak atas dasar semangat *besiru* (berbagi) yang spontan, revitalisasi *banjar* berhadapan dengan persoalan penguatan bangunan kelembagaan. Tanpa kelembagaan yang mapan, proses perubahan sosial yang berujung kepada peningkatan dan pengembangan kapasitas nilai dan institusi *banjar* yang diharapkan lahir dari upaya revitalisasi *banjar*, sangat mungkin gagal terwujud.

Kelembagaan *banjar* perlu diperkuat, bukan hanya untuk kepentingan internal, melainkan juga untuk kepentingan eksternal, misalnya agar bisa berinteraksi secara efektif dengan lembaga-lembaga luar. Banyak persoalan pembangunan yang tidak mungkin *banjar* tangani sendiri, sebut saja misalnya persoalan mendorong kapasitas ekonomi, mendorong perubahan struktur sosial bagi petani (*land reform*), mengembangkan kapasitas demokrasi lokal, masalah lingkungan hidup dan isu perempuan. Semua itu memerlukan interaksi yang intensif dengan kelompok di luar

banjar tetapi bersamaan dengan ketika melakukan interaksi keluar, kemandirian *banjar* mendapat ujian. Itulah pentingnya *banjar* memperkuat kelembagaannya. Apalagi sering pula kelompok luar tidak memahami spirit *banjar* sebagai institusi lokal di tingkat warga. Dengan memperkuat kelembagaan, *banjar* sekaligus memperkuat posisi tawarnya vis a vis kekuatan lainnya, baik itu kekuatan birokrasi negara maupun kekuatan pasar.

Memperkuat kelembagaan juga penting agar *banjar* mampu memetakan potensi dirinya secara tepat dan mengoptimalkan potensi itu secara efisien. Pengalaman revitalisasi *banjar* di Pulau Lombok, memperlihatkan warga *banjar* cukup tahu apa saja yang menjadi potensi dirinya, tetapi sebagian besar mereka –untuk tidak menyatakan keseluruhannya—sangat lemah dalam mengelola potensi itu menjadi keunggulan kompetitif mereka. Pelembagaan yang lemah menjadi faktor penyebab mengapa masyarakat *banjar* kurang kreatif, minim inovasi dan sering jatuh kepada sikap mental pasrah melihat keadaan. Kelemahan mendasar dari penguatan kelembagaan di *banjar* adalah minimnya etos dalam mengembangkan model-model usaha produktif. Keberanian untuk memulai usaha memang menjadi kendala, dilanjutkan dengan kemampuan manajerial yang kurang dan jaringan bisnis yang terbatas. Perhatian pemerintah pun hampir-hampir tidak ada.

Penguatan kelembagaan institusi *banjar*, setidaknya harus berdampak kepada tiga kelompok sasaran. *Pertama*, individu warga. Tidak akan mungkin kapasitas kelembagaan menguat jika kapasitas individu warga tidak diberdayakan. Penguatan kapasitas individu warga mencakup pengembangan kapasitas wawasan, kemampuan (skill), sikap dan perilaku. *Banjar* dengan bale *banjarnya* harus didorong lebih intens menjadi arena tempat pergumulan dan pergulatan individu warga di desa untuk mendorong proses perubahan sosial.

Jika *banjar* berhasil melakukan transformasi sikap mental berupa perubahan wawasan, kemampuan, sikap dan perilaku sosial warganya, maka penguatan kelembagaan akan terbangun dengan sendirinya. Upaya-upaya sederhana sebagai yang sudah dilakukan di beberapa *banjar*, misalnya dengan melakukan pelatihan bagi komunitas kelompok tani, para ustad atau guru ngaji, pemimpin organisasi pemuda dan

komunitas kaum perempuan bisa menjadi cara jitu memperkuat kapasitas individu warga.

Kedua, kelompok masyarakat. *Banjar* yang institusinya terbangun dengan kuat karena individu di dalamnya telah melalui proses pengembangan kapasitas diri adalah modal sosial yang bisa mengembangkan kapasitas kelompok masyarakat di desa menjadi lebih produktif. Di sana terbangun hubungan sosial saling percaya antar sesama warga (*interpersonal trust*). Sikap toleransi dan menghargai perbedaan juga menjadi ciri utamanya. Watak altruistik dalam merumuskan kepentingan bersama terasa kental. Nilai-nilai kearifan lokal seperti *merang* (malu), *tindih* (konsisten) dan *besiru* (berbagi) menjadi roh pergaulan. Intinya, nilai demokrasi menjadi pegangan.

Secara khusus, kelompok perempuan harus mendapatkan prioritas penguatan. Seringkali perempuan di *banjar* belum mampu mengoptimalkan peluang menjadikan *banjar* sebagai ruang budaya mereka. Mentalitas sebagai kaum “kelas dua” atau bayang-bayang hegemoni laki-laki, masih terkesan terbawa dalam interaksi di *banjar*. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan *banjar*.

Ketiga, struktur sosial. Penguatan kapasitas kelembagaan di *banjar* harus pula dapat mewarnai struktur sosial masyarakat. Perubahan ini tentu saja jauh lebih luas daripada perubahan di tingkat individu dan kelompok masyarakat. Sudah pasti lebih luas, karena tantangan mewujudkannya juga menjadi lebih sulit dan kompleks. Pada tataran ini, *banjar* akan lebih intens berinteraksi dengan pemerintah, LSM, lembaga politik, kalangan usaha dan sebagainya. Mengubah struktur sosial bisa dengan dua cara: revolusi yang radikal atau reformasi yang gradual. *Banjar* jelas merupakan intitusi lokal yang memilih perubahan bertahap namun dengan progresifitas yang terukur**

Epilog

Revitalisasi *Banjar*: Model Otonomi Pembangunan Desa

*“Desa adalah kenyataan
Kota adalah pertumbuhan
Desa dan kota tak terpisahkan
Tapi desa harus diutamakan”*

(Iwan Fals dalam album *Manusia ½ Dewa*)

Revitalisasi *banjar* bisa menjadi model alternatif pembangunan desa. Pembangunan itu sendiri sering dimaknai sebagai proses di mana suatu masyarakat dapat terus-menerus meningkatkan kapasitas individual dan institusional mereka. Institusional disini tidak semata bermakna sebuah wadah lembaga, tetapi juga merujuk kepada sistem nilai, adat, tradisi dan struktur masyarakat yang membentuk perilaku dan hubungan orang-orang di dalam masyarakat.

Jika merujuk makna di atas, jelas tersirat kata kunci pembangunan adalah peningkatan kapasitas. Jika pembangunan gagal meningkatkan kapasitas, baik kapasitas individual maupun institusional masyarakat, maka dengan sendirinya pembangunan disebut gagal menjalankan misinya. Selain pengertian sebagai proses peningkatan kapasitas, pembangunan juga sering dimaknai sebagai proses transformasi. Dalam maknanya sebagai proses transformasi, pembangunan setidaknya dituntut untuk mampu menangani tiga kebutuhan pokok masyarakat: (1) keadilan, (2) keberlanjutan dan (3) ketercakupan.¹⁴

Pembangunan sebagai sebuah konsep transformasi yang *berkeadilan* tidak menuntut sama rata sama rasa, melainkan bagaimana pembangunan itu membuka, memberi dan memperlakukan akses yang sama kepada setiap individu, kelompok atau

¹⁴ Baca David Korten, *Menuju Abad 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 1993).

institusi. Pembangunan yang berkeadilan juga menekankan pentingnya prioritas dalam pengelolaan sumber-sumber pembangunan, baik sumber daya alam, sumber daya kapital, sumberdaya manusia dan modal sosial. Ukuran prioritas sudah pasti adalah keadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan yang *berkelanjutan* menekankan sikap hati-hati dan kejelian memilih dan mengembangkan strategi pembangunan. Salah memilih strategi pembangunan sama saja dengan menghabiskan secara tidak bertanggung jawab setiap sumberdaya yang ada. Terakhir adalah *ketercakupan*. Pembangunan harus memberi jaminan bahwa setiap orang atau kelompok masyarakat bisa terlibat secara produktif menyumbang dan mendapatkan kontribusi dari pembangunan.

Bagaimana dengan pembangunan desa? Sudahkah ia mencerminkan setidaknya dua pengertian pembangunan di atas, yaitu sebagai proses peningkatan kapasitas dan proses transformasi yang mencakup keadilan, keberlanjutan dan ketercakupan? Kalau kita kilas balik pembangunan desa selama ini, dengan segera kita bisa katakan pembangunan desa belum melahirkan proses peningkatan kapasitas dan transformasi itu.

Sebaliknya yang terjadi, masyarakat desa hanya menjadi sekrup, etalase, atau umbul-umbul dari sebuah pagelaran akbar yang bertajuk cantik: pembangunan nasional. Keseragaman, sentralisme dan kepatuhan tanpa *reserve* menjadi watak dasar pembangunan desa yang dikendalikan sepenuhnya oleh negara (pemerintah). Terjadilah kemerosotan inisiatif lokal yang luar biasa di desa.

Kehidupan desa sangat tidak sehat, seperti pohon yang tercabut dari akarnya. Para elitnya lebih sering “menghamba” ke atas ketimbang mencoba berakar ke bawah. Mereka bukan lagi elit yang memberi inspirasi dan keteladanan laku buat warganya. Masyarakat desa menjadi miskin kreativitas karena tidak pernah mampu meningkatkan kapasitasnya. Orang desa lebih sering pasrah dengan kemiskinan dan ketertinggalan mereka. Etos untuk maju hampir-hampir tidak ada lagi. Pikiran dan tingkah laku begitu pragmatis. Mereka menjadi epigon (peniru) budaya yang mementingkan “kulit luar”

ketimbang “nilai dalam” dari apa yang ditirunya. Nilai-nilai dan institusi lokal yang menjaga bangunan harmoni bersama tidak lagi terjaga roh dan spiritnya.

Lima Konsep Dasar

Ada beberapa hal yang diperlukan desa untuk memulihkan dirinya Pertama, “dekonstruksi sentralisme”. Intervensi negara dalam membangun desa sudah saatnya kita letakkan pada proporsinya. Mungkin negara cukup berposisi seperti kata-kata bijak Ki Hajar Dewantara, “*Tut Wuri Handayani, ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangun Karsa*” yang secara harafiah berarti negara dari belakang memberi inspirasi, dari depan memberi teladan dan dalam prakteknya membangun bersama masyarakat, bukan membangun untuk masyarakat.

Dengan kata lain, desa memerlukan otonomi dalam pengertian masyarakat desa diberikan otoritas penuh untuk belajar bertanggung jawab dan mengelola potensi dirinya secara mandiri. Harus dipahami betul, membangun desa berarti membangun manusia desa. Hanya dengan memberi otonomi, pembangunan manusia desa bisa dilakukan. Sementara pembangunan fisik bukan tidak penting, tetapi tanpa membangun manusia desa, pembangunan fisik di desa hanya akan kelihatan serba wah dari luar, tetapi keropos dan rapuh secara esensial. Manusia desa tidak akan mendapat manfaat yang konstruktif dari gemerlap pembangunan fisik, bila mentalitas mereka sendiri belum terbangun.

Jika kita percaya soal pentingnya otonomi desa dengan pertama-tama membangun manusianya, bukan fisiknya, maka harus ada upaya mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas lokal. Ini yang dikenal dengan konsep *People Centered Development*. Sebuah konsep pembangunan desa yang menekankan manusia sebagai subyek atau pelaku utama.

Selain membangun manusia, otonomi desa seyogyanya mendorong pembangunan yang berbasis nilai lokal, pembangunan desa harus ditujukan kepada pemberdayaan nilai (*value*) lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Nilai lokal berfungsi sebagai rambu-rambu yang memberi batas agar pembangunan desa tidak

menjadi salah arah dan salah kaprah. Tidak boleh ada kebijakan pembangunan desa yang melanggar apalagi dengan sengaja berlawanan dengan nilai lokal. Ini yang banyak disebut dengan model pendekatan pembangunan desa yang *Value Oriented Development*.

Tahap selanjutnya otonomi desa juga mestinya bergerak memperkuat kelembagaan sosial yang ada di desa atau yang disebut dengan konsep *Institution Development*. Konsep ini menekankan pentingnya kelembagaan sosial untuk mempercepat pemberdayaan dan mendorong pembangunan desa. Konsep ini menitikberatkan kepada pentingnya masyarakat mengorganisir dirinya agar lebih solid, kuat, dan mampu berswadaya.

Lebih lanjut, otonomi desa mesti bisa menjamin *Sustainability* atau keberlanjutan. Pembangunan desa tidak boleh menjadi satu rangkaian yang terpisah-pisah, tanpa benang merah yang mengikatnya menjadi satu gerakan bersama masyarakat yang berkelanjutan. Untuk mendorong tumbuhnya kemampuan masyarakat desa menjamin keberlanjutan pembangunan, daya gerak masyarakat harus digugah, dirangsang, diberikan stimulan dan terkelola.

Pada akhirnya otonomi desa sepatutnya mendorong *Self Reliance* atau kemandirian warga. Kemandirian di sini juga dimaknai sebagai bentuk kemandirian kolektif atau bersama. Dalam kemandirian kolektif ini, prinsip utamanya adalah ketergantungan, yang mengartikan setiap warga tidak mungkin bisa hidup seorang diri tanpa bantuan warga lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada lima hal yang hendak dibangun dari otonomi desa yaitu Membangun Manusia (*People Centered Development*), Membangun Nilai (*Value Oriented Development*), Membangun Institusi (*Institution Development*), Membangun secara Berkelanjutan (*Sustainability Development*) dan Membangun Kemandirian (*Self-Reliance*). Sekalipun setiap konsep pembangunan ini memiliki titik tekan yang tak sama, dalam prakteknya semua konsep tersebut saling melengkapi bukannya meniadakan. Pembangunan desa idealnya mencakup pelbagai konsep di atas, tidak bisa memilih salah satu dan menanggalkan yang lain.

Sejatinya gagasan revitalisasi *banjar* bergerak merealisasikan otonomi desa bersandarkan lima konsep pembangunan tersebut. Di *banjar*, manusia menjadi obyek pembangunan, khasanah nilai dan norma masyarakat lokal menjadi pegangan bersama dalam bentuk awik-awik, warga mengorganisir dirinya menjadi suatu kelembagaan yang mendorong gerakan perubahan sosial. Keberlanjutan setiap kegiatan menjadi dasar setiap gerakan atau perencanaan kegiatan. Pada akhirnya kemandirian setiap warga dan kemandirian kolektif antar warga dalam bentuk saling mendukung, membantu dan meringankan menjadi roh setiap aktivitas.

Jika benar otonomi desa hendak diwujudkan, *banjar* bisa dikatakan miniatur dari bagaimana selayaknya desa kita kelola. Apabila kita bayangkan desa sebagai satu tubuh, *banjar* adalah jantung yang memompa aliran darah bagi aktivitas tubuh itu. Sebagai jantung, *banjar* teramat vital bagi kelangsungan hidup desa. *Banjar* itulah potret desa sesungguhnya karena warga desa merumuskan tantangan dan sekaligus jawaban untuk masa depan mereka**

Kosa Kata

- Banjar (11)
- Besiru (13)
- Bale Banjar (18)
- Reme (13)
- Becerite Sole Beteng (20)
- Temolon (21)
- Awik-Awik (21)
- Tatet Embas Nyiur (32)
- Bank Subuh / Bank Rontok (33)
- Inag (35)
- Talet Embas Nyiur (36)
- Terpasung (39)
- Vis a Vis (42)
- Merang (44)
- Tindih (44)
- Reserve (46)

– **Bahan Bacaan**

Antlov, Hans., *Negara Dalam Desa*. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama, 2003).

Budiman, Arief., 1996. *Teori Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

BPS., 2004. *Perhitungan Indeks Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat*

Bappeda NTB., 2004. *Tinjauan Perekonomian Nusa Tenggara Barat*.

Bappeda NTB., 2004. *Nusa Tenggara Barat Daerah Tujuan Investasi (Identifikasi Potensi Wilayah Dan Peluang Investasi)*

Bank Indonesia., 2006. *Kajian Ekonomi Regional Nusa Tenggara Barat Triwulan II*

Chambers, Robert., 1988. *Pembangunan Desa*. Jakarta: LP3ES

Kontowijoyo., 1993. *Paradigam Islam*. Bandung: Penerbit Mizan

Koenjaranigrat., 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Korten, David C., 1993. *Menuju Abad ke-21*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia dan Sinar Harapan

Khudori., 2005. *Lapar: Negara Salah Urus!* Yogyakarta: Resist Book

Kukuh, Catur dan Farid Tolomundu (ed)., 2006. *Tiga Menguak Perubahan Penggalangan Sumber Daya Berbasis warga Negara*. Mataram: Santiri Fondation

Lubis, Mochtar., 2001. *Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia

Markum, Eko Bambang S, Muhammad Ridha H., 2004. *Dinamika Hubungan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pulau Kecil: Kasus Pulau Lombok*. Mataram: WWF Nusa Tenggara

Windia, Bayu., 2006. *Manusia Sasak*. Yogyakarta: Genta Press

LAMPIRAN

Profil *Banjar* Dampingan:

Kabupaten Lombok Barat:

1. *Banjar* Sabak, Dusun Kayu Putek, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong
 - Spesifikasi wilayah: daerah wisata laut.

Aset yang dimiliki:

- Bale *banjar* seluas 4 x 8 meter.
- Berugak.
- Beberapa buku bacaan.

Program dan kegiatan yang pernah dan sedang dijalankan:

- Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola kader posyandu.
- Taman Bacaan Masyarakat.
- Simpan pinjam tanpa bunga untuk masalah kesehatan dan pendidikan.
- Simpan pinjam modal usaha.
- Pertemuan rutin *banjar* tiap malam tanggal 15 hijriah untuk yasinan dan membahas berbagai permasalahan warga.
- Menjalankan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, bekerjasama GRAVITASI–Oxfam GB.
- Membuka Posko Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin bekerjasama GRAVITASI–World Bank, program Justice for the Poor.

2. *Banjar* Beriuk Dayung, Dusun Batu Kijuk, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong.

Program dan kegiatan yang pernah dan sedang dijalankan:

- Simpan pinjam tanpa bunga untuk masalah kesehatan dan pendidikan.
- Simpan pinjam modal usaha.
- Pertemuan *banjar* tiap malam tanggal 14 bulan hijriah untuk membahas berbagai permasalahan warga.
- Menjalankan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan bekerjasama GRAVITASI–Oxfam GB.
- Membuka posko bantuan hukum untuk masyarakat miskin, bekerjasama GRAVITASI–World Bank, program Justice for the Poor.

3. *Banjar* Perpih Diriq, Dusun Tradisional Segenter, Desa Sukadana, Kecamatan Kayangan.

Program dan kegiatan yang pernah atau sedang dijalankan:

- Simpan pinjam tanpa bunga untuk masalah kesehatan dan pendidikan.
- Simpan pinjam modal usaha.
- Pertemuan rutin bulanan untuk membahas berbagai permasalahan warga.
- Menjalankan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, bekerjasama GRAVITASI–Oxfam GB.
- Membuka posko bantuan hukum untuk masyarakat miskin, bekerjasama GRAVITASI–World Bank, program Justice for the Poor.

4. *Banjar* Sridaya, Dusun Batu Santek, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan,
Program dan kegiatan yang pernah atau sedang dijalankan:
 - Simpan pinjam tanpa bunga untuk masalah kesehatan dan pendidikan.
 - Simpan pinjam modal usaha.
 - Pertemuan rutin tiap bulan untuk membahas berbagai permasalahan warga.
 - Menjalankan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, bekerjasama GRAVITASI–Oxfam GB.
 - Membuka posko bantuan hukum untuk masyarakat miskin, bekerjasama GRAVITASI–World Bank, program Justice for the Poor.

5. *Banjar* Temeran, Dusun Temeran, Desa Tawun, Kecamatan Sekotong.
 - Spesifikasi wilayah: daerah wisata laut.
 Kegiatan yang sudah dijalankan:
 - Pertemuan rutin warga tiap bulan untuk menyerahkan iuran dan membahas permasalahan warga.

6. *Banjar* Tibu Baru, Dusun Brambang, Desa Batu Putek, Kecamatan Sekotong.
 - Spesifikasi wilayah: daerah wisata laut.
 Aset yang dimiliki:
 - Bale *banjar*.
 - Rak buku dan beberapa buku bacaan.
 Kegiatan:
 - Pertemuan rutin warga tiap bulan untuk menyerahkan iuran dan membahas permasalahan warga.

7. *Banjar* Tunas Muda, Dusun Batu Koq, Desa Senaru, Kecamatan Bayan.
 - Spesifikasi wilayah: daerah wisata.
 Kegiatan:
 - Kelompok kesenian remaja.

8. Dusun Sumur Pande, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan.
 - Spesifikasi wilayah: daerah pertanian.
 Aset yang dimiliki:
 - Berugak *banjar*.
 - Ruang dan rak buku perpustakaan.

Mengajukan Pendampingan:

9. *Banjar* di Dusun Aik Pedis
10. *Banjar* di Gili Gede

Kabupaten Lombok Tengah:

11. *Banjar* Medane, Dusun Ketangge, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat.
 - Spesifikasi wilayah: daerah ekowisata.

Kegiatan yang sudah pernah atau sedang dijalankan:

- Pertemuan rutin bulanan tiap Jumat sore minggu pertama setiap bulan.
- Bekerjasama dengan pesantren setempat menyelenggarakan PAUD.

Aset yang dimiliki:

- Berugak *banjar*.
- Tujuh kolam lele yang hasilnya ditabung untuk kas *banjar*.

12. *Banjar* Tunas Maju, Dusun Pondok Rejeng, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat.

- Spesifikasi wilayah: daerah pertanian.
- Sebagian besar anggotanya adalah kelompok tani.

Aset yang dimiliki:

- Berugak seluas 5 x 3 m sebagai balai pertemuan, berdiri di tanah milik *banjar*.
- Ruang baca.
- Sekretariat.
- Kas kelompok.
- Gudang pupuk.
- Kios sembako.
- Komputer dan mesin tik.
- Kelompok tani.
- Kelompok perikanan.
- Kelompok peternakan.
- Koperasi serba usaha.

Kabupaten Lombok Timur:

13. *Banjar* Temolan, Dusun Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Mulai direvitalisasi tahun 2000, berdiri 25 Maret 2001.

- Jumlah anggota 83 KK.
- Spesifikasi wilayah: daerah pertanian

Aset yang dimiliki:

- Telah memiliki bale *banjar* dan sekretariat seluas 6 x 12 m di atas tanah milik warga setempat (hak guna pakai) dan didirikan dari hasil swadaya masyarakat.
- Ruang sekretariat.
- Perpustakaan *banjar*.
- Rak buku perpustakaan dan beberapa buku bacaan.
- Kelompok qasidah remaja.
- Dua papan tulis.

Kegiatan yang pernah atau sedang dijalankan:

- Pertemuan rutin tiap malam tanggal 15 bulan Hijriah untuk membicarakan permasalahan warga, arisan, dan menyelesaikan urusan simpan pinjam.
- Iuran simpan pinjam digunakan untuk ekonomi produktif, prioritas pinjaman untuk pendidikan dan kesehatan (tanpa bunga).
- Kegiatan PAUD oleh tutor dengan kualifikasi S1.

- Kontrak kerjasama dengan dokter praktik setempat untuk akses pelayanan kesehatan warga *banjar* yang butuh pengobatan membawa kartu anggota *banjar* dan mendapat potongan biaya sebesar 50 %.
- Menjalankan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, bekerjasama GRAVITASI–Oxfam GB.
- Kerjasama GRAVITASI-World Bank divisi Justice for the Poor membuka posko penguatan dan bantuan hukum bagi rakyat miskin.
- Kerjasama BI untuk mensosialisasikan uang palsu.
- Kerjasama Dompot Dhuafa melaksanakan sunatan massal.
- Kerjasama PT Djarum melakukan transfer teknologi penanaman tembakau.
- Kerjasama BAZDA Lombok Timur untuk penyaluran dana bagi kaum miskin.
- Kerjasama LSM SANTAI untuk program pencegahan HIV-AIDS.

Prestasi: Pemenang Community Based Initiative Competition (CBIC) 20 tahun ASHOKA di Indonesia.

14. *Banjar* Nurul Iman, Dusun Jorong Koak-Tibu Lampit, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba.

Aset yang dimiliki:

- Bale *banjar* seluas 6 x 12 meter.
- Ruang perpustakaan dan sekretariat *banjar*.

15. *Banjar* Al Muttaqien, Dusun Lendang Karang, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel.

Aset yang dimiliki:

- Bale *banjar* seluas 6 x 12 meter.
- Ruang perpustakaan dan sekretariat *banjar*.

16. *Banjar Banjaransari*, Dusun Mujur, Desa Montongbetok, Kecamatan Montong Gading.

Mulai didampingi tahun 1997.

- Spesifikasi wilayah: daerah pertanian jalur wisata.

Aset yang dimiliki:

- Bale *banjar* seluas 4 x 8 meter.
- Rak buku perpustakaan dengan beberapa buku bacaan.
- Tabel pengurus organisasi.
- Grup kesenian wayang kulit.
- Grup kesenian Rebana Lima.

Kegiatan yang sudah dijalankan:

- Mendongeng tiap hari Rabu dan Sabtu.
- Pendidikan aksara Arab.
- Tempat anak-anak belajar membaca al-Qur'an.
- Tempat pendidikan aksara lokal bagi anak-anak.
- Sebagai tempat membaca lontar, hikayat, dan nembang.
- Menyelenggarakan PAUD.
- Menyelenggarakan lomba permainan tradisional (cuku lele, gangsing, dll).

Prestasi: Mendapat penghargaan Kanwil Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Lombok sebagai institusi masyarakat pelestari kebudayaan dan kesenian tradisional.